

344.046
LIS
k
1998



KESADARAN HUKUM PENGUSAHA DALAM MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

(Studi Pada Pengrajin Batik Tamansari Yogyakarta)

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh :
DRA. DYAH LISTYARINI, SH.
B.002.95.0152

PEMBIMBING

PROF. DR. KOESNADI HARDJASOEMANTRI, SH.,ML.

UNIVERSITAS DIPONEGORO
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KAJIAN ILMU HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI
SEMARANG
1998

**JUDUL TESIS : KESADARAN HUKUM PENGUSAHA DALAM
MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP.
(Studi Pada Pengrajin Batik Tamansari Yogyakarta).**

**Tesis ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Komisi Penguji
Program Studi Hukum Ekonomi Dan Teknologi, Program Magister Ilmu Hukum
Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.**

Semarang, 1998.

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum Undip**



**Prof. H. Purwahit Patrik, SH
NIP. 130 307 058**

Pembimbing,

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam memberikan kemampuan dan kekuatan pada penulis sehingga tesis yang berjudul “Kesadaran Hukum Pengusaha Dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup di Tamansari Yogyakarta” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian dan pembahasan tesis ini beranjak dari minat kami untuk lebih memahami tentang hukum lingkungan, khususnya pelestarian lingkungan hidup yang sangat besar manfaatnya bagi kelangsungan mahluk hidup di muka bumi ini, khususnya bagi industri kecil batik di Tamansari Yogyakarta yang rawan pencemaran karena di daerah tersebut sebagian besar warganya sebagai pengrajin batik yang telah ada secara turun-temurun sejak abad XVII.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Ir. Eko Budiardjo Msc, sebagai Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. H. Purwahid Patrik, SH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, sekaligus sebagai pembimbing kami pada mata kuliah Hukum Lingkungan.
3. Prof. DR. Koesnadi Hardjasoemantri, SH selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan stimulasi, arahan dan bimbingan ilmiah dalam penulisan tesis ini.

4. DR. Esmi Warassih, SH, MS. yang telah membekali pemahaman Metodologi secara jelas dan tajam dalam menganalisis suatu permasalahan.
5. Seluruh Guru Besar, Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah bersama-sama memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti pendidikan si S-2 Universitas Diponegoro Semarang.
6. Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah yang telah memberikan izin pada kami selaku Dosen PNS-DPK Akademi Kesejahteraan Sosial “Ibu Kartini” Semarang untuk dapat mengikuti studi S-2 Universitas Diponegoro Semarang.
7. Ibu Hj. Ismail selaku Ketua Yayasan Ibu Kartini Semarang yang telah ikut merestui kami untuk meningkatkan studi yang lebih tinggi.
8. Dra. Sri Harini Suprpto Direktur Akademi Kesejahteraan Sosial “Ibu Kartini” Semarang yang telah memberikan izin serta dorongan kelancaran studi.
9. Dra. Indarwati Retmono, pada saat beliau menjabat Direktur AKS, telah memberikan dorongan dan motivasi untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Diponegoro Semarang.
10. Kartini Soedjendro, SH yang telah memberikan pengarahan dan motivasi untuk mengambil keputusan melanjutkan studi S2 di Universitas Diponegoro, serta telah banyak memberikan pinjaman buku-buku literatur selama studi maupun dalam rangka penyusunan Thesis.

11. Staf Setwilda Tingkat II Daerah Tingkat II Kotamadia Yogyakarta khususnya Kasubag Hukum, Kasubag Lingkungan Hidup, Kasubag Perekonomian, Kasubag Statistik, dan Staff Dinas Perindustrian Dan Perdagangan yang telah memberikan informasi dan bantuan yang sangat berharga dalam penyusunan data tesis ini.
12. Ibu Dra. Ida Farida, selaku Kasubag Dinas Perindustrian Dan Perdagangan yang telah banyak membantu memberikan data yang kami perlukan dalam penulisan.
13. Bp. Mardiyono, selaku Ketua Paguyuban Pengusaha Batik di daerah Tamansari Yogyakarta.
14. Para pengusaha batik di lingkungan Tamansari Yogyakarta, yang telah dengan sabarnya menerima kehadiran kami untuk mencari informasi yang diperlukan.
15. Seluruh Staf Administrasi Kantor Statistik Yogyakarta, yang banyak memberikan data yang menunjang kelancaran penulisan tesis ini.
16. Ibu Ndari, Staff Perpustakaan Kantor Statistik Yogyakarta, yang banyak memberikan informasi maupun pinjaman buku-buku yang menunjang penulisan penelitian ini.
17. Bp. Drs. Sri Wahyudi, Kabag Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Yogyakarta, yang telah banyak memberikan data maupun penjelasan-penjelasan mengenai pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Tamansari.
18. Seluruh staf administrasi dan perpustakaan Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, yang telah

memberikan pinjaman buku-buku cetakan dan bacaan yang terkait dalam penulisan tesis ini.

19. Seluruh rekan-rekan dosen Akademi Kesejahteraan Sosial “Tbu Kartini” Semarang yang telah ikut memberikan dorongan dan semangat untuk cepat menyelesaikan studi S-2 ini.
20. Suamiku terkasih dan anak-anakku yang sangat kusayangi Chacha dan Adek yang telah menjadi pendorong semangatku dan doanya yang tulus dalam menyelesaikan studi ini, kepada Ibunda dan kakak serta adik-adikku tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dorongan semangat yang besar dalam menyelesaikan studi di S-2 Universitas Diponegoro Semarang ini.
21. Kepada semua pihak yang tidak mungkin dapat penulis sebut satu-persatu, yang telah memberikan bantuan hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Mudah-mudahan tesis ini dapat memberikan manfaat ganda bagi kepentingan penulis maupun bagi kepentingan masyarakat akademik.

Semarang, Nopember 1998

penulis,

Dyah Listyarini

RINGKASAN

Salah satu sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya pelestarian fungsi lingkungan hidup secara nyata. Untuk itu diperlukan tingkat kesadaran masyarakat khususnya para pengusaha bidang industri di dalam mengelola lingkungan hidup yang membawa manfaat bagi peningkatan kualitas kehidupannya, sebab setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Untuk dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tentunya setiap orang juga dituntut untuk berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut, kesadaran hukum pengusaha batik Tamansari cukup menarik untuk dipelajari dan diteliti keberhasilannya dalam meningkatkan taraf hidup melalui usaha batiknya, yang telah dilakukan dalam kehidupan yang turun-temurun sejak tahun 1933. Dari tahun ke tahun usaha batik di Tamansari Kecamatan Kraton Yogyakarta mengalami perkembangan yang pesat dalam memasarkan produknya ke dalam maupun ke luar negeri.

Mengamati langsung kondisi lingkungan batik Tamansari Yogyakarta sudah cukup nyaman dan sehat, kebersihan lingkungannyapun terjaga, walaupun rumah-rumah tempat memproduksi batik kelihatan sederhana dan tidak permanen. Hal ini disebabkan tanah yang mereka tempati adalah milik Kraton, sehingga mereka patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Kraton, yang antara lain adalah

keharusan menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan ada beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi kesadaran hukum para pengusaha batik terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, di antaranya adalah : budaya dan sikap patuh, tingkat pendidikan yang cukup, status tanah milik Kraton, sikap penguasa Kraton yang mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup, usaha pemerintah dalam mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Letak Tamansari adalah di Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton Kotamadia Yogyakarta, mempunyai luas tanah 12,666 hektar, yang didiami oleh 565 kepala keluarga, dengan jumlah penduduknya 2622 jiwa yang terdiri dari 1391 laki-laki dan 1231 wanita. Tamansari yang terkenal dengan seni batiknya itu, pada awalnya merupakan daerah yang diperuntukkan bagi para abdi dalem dan kerabat Kraton.

Tahun demi tahun menjadikan perkembangan industri batik menjadi semakin maju dengan sentuhan artistiknya, sehingga banyak pesanan batik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Batik ternyata juga memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap devisa negara dan sekaligus dapat menyerap cukup banyak angka pencari kerja. Penyerapan tenaga kerja rata-rata 4 sampai 15 orang pada setiap industri batik di Tamansari, yang berjumlah 64 perusahaan.

Pada satu sisi, perkembangan industri batik yang cukup pesat di Tamansari Yogyakarta memberikan dampak positif berupa penyediaan lapangan pekerjaan, me-

ningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan sumbangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan kontribusi terhadap devisa negara. Namun di sisi lain tentunya juga akan membawa dampak yang negatif terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup apabila tidak diantisipasi terlebih dahulu.

Sehubungan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, perlu adanya kesadaran hukum pengusaha batik di Tamansari Yogyakarta dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup, yang dalam hal ini akan dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut, yaitu indikator pengetahuan tentang peraturan hukum, indikator pemahaman akan isi peraturan-peraturan hukum, indikator sikap dan perikelakuan hukum pengusaha terhadap peraturan-peraturan hukum.

Sebagai acuan atau pedoman penilaian untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum pengusaha terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan keempat indikator yang ada tersebut dalam aplikasinya antara lain adalah:

1. Undang Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep.12/Men LH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
3. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
4. Peraturan Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 9 tahun 1977 tentang Ijin H.O.

5. Keputusan Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 037/KD/1988 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tempat Usaha.

Secara keseluruhan kelima butir tersebut di atas merupakan peraturan hukum lingkungan yang dikenakan pada pengusaha industri kecil batik di Tamansari Yogyakarta.

Dengan menggunakan analisis secara yuridis sosiologis baik dari data primer maupun sekunder, data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara secara mendalam dengan responden (pengusaha) batik Tamansari Yogyakarta, dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, data dari instansi terkait, antara lain dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Kantor Statistik, Bagian Lingkungan Hidup dan Bagian Perekonomian Setwilwa Tingkat II Kotamadia Yogyakarta.

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menjadi satu bagian yang saling kait-mengkait dan tidak terputus, sehingga akan terlihat benang merahnya, antara kesadaran hukum pengusaha terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum pengusaha industri kecil batik Tamansari Yogyakarta memiliki tingkat pengetahuan hukum lingkungan yang cukup baik, karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pengusaha yang sudah cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pendidikan pengusaha yang sebagian besar adalah SLTA sampai dengan perguruan tinggi. Penegakan hukum lingkungan hidup telah

dilakukan oleh pengusaha batik Tamansari.

2. Pengusaha batik Tamansari dalam memahami hukum, terutama tentang isi peraturan hukum sudah cukup baik, sehingga para pengusaha mau menaati peraturan perundang-undangan hukum lingkungan hidup yang ada. Hal tersebut menyebabkan tingginya tingkat kesadaran hukum dari para pengusaha batik Tamansari.
3. Sikap dan perilaku pengusaha batik Tamansari Yogyakarta terhadap kesadaran hukum cenderung tinggi karena dipengaruhi oleh adat kebiasaan yang sudah berjalan secara turun-temurun, yaitu patuh dan taat kepada penguasa Kraton, termasuk semua aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dikeluarkan oleh Kraton.

Kebiasaan patuh kepada aturan-aturan Kraton ini yang memotivasi para pengusaha batik untuk mematuhi pula ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan usaha industri batik.

4. Ada beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu tingkat pendidikan, budaya dan sikap patuh, kondisi status tanah milik kraton, sikap penguasa kraton yang mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup dan usaha pemerintah yang mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Di antara kelima faktor tersebut yang menjadi pendorong utama adalah budaya dan sikap patuh pengusaha terhadap penguasa kraton.

Adat kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun-temurun selama berabad-abad merupakan faktor pendorong yang kuat, karena adat kebiasaan itu secara otomatis telah membentuk pola pikir dan sikap seseorang sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, sehingga akhirnya terbentuk suatu pola / sikap yang demikian kuat, membudaya, mendalam dan bahkan sampai membentuk sifat fanatisme yang terkadang sulit dipahami oleh orang lain.

Sikap patuhnya para pengusaha Tamansari kepada penguasa Kraton Yogyakarta demikian besarnya, sehingga apapun yang diperintahkan ataupun dilarang oleh penguasa Kraton akan dipatuhi dan dilaksanakan secara tulus ikhlas, termasuk masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

SUMMARY

One of environmental management objectives is to achieve conserved. Environmental function as real. So that it is required people's awareness especially by the industrial entrepreneur in controlling environment in which beneficial for promoting the quality of life, since everyone has equal rights on healthy environment. For creating healthy and good environment, every one has obligation to main turn environment function as well as preventing and over coming pollution and environment damaging.

Subsequently, law awareness of Tamansari batik entrepreneurs is interesting to be studied regarding their success in promoting their standard of life by batik entrepreneurship, which handed down since 1933. From years to years batik entrepreneurship at Tamansari kecamatan Kraton Yogyakarta has been fast developed in distributing their product locally as well as a broad markets.

Observing directly that the neighborhood condition in Tamansari Yogyakarta is healthy and comfortable, and environment cleanliness is well maintained also, even though the houses for producing batik seem unpretentious and a permanent. This is because their lots are properties of Kraton (Royal palace), so they have to obey the rules issued by the Kraton, such as obligations for conserving the environment function. Observation findings on site indicates there are several factors in fluencing the law awareness of the batik entrepreneurs on conserving environmental function such as : obedience, well educated, kraton's property

rights, the kraton authority's demeanor that support conservation of environmental, and governmental efforts in realization of conserving environmental function.

Tamansari located in Patehan village, kecamatan kraton Municipality Yogyakarta has 12, 666 hectare wide, lived by 565 families with 2622 inhabitants consists of 1391 males and 1231 females. Tamansari is well known by its batik art, for formerly was an area provided for the royal servants (abdi dalem) and royal relatives.

Year by year, the development of batik industries has become advanced far by their artistic touch, so that many orders received from inland and foreign countries. Batik has also gave great contribution for state foreign currencies acceptance and demanding a great deal of employees. The labor demand averages from 4 to 15 persons for each industry in Tamansari which exactly to the amount 64 entrepreneurship.

On one hand, the batik industry development in Tamansari Yogyakarta gave positive impact in form of labor vacancies increasing people's income, contribution for regional economic growth rate as well as contribution for state foreign currencies acceptance.

Regarding to the conservation of environment function, it is a necessity of law awareness of the batik entrepreneurs in Tamansari Yogyakarta in maintain the environment, which could be seen by the following indicators i.e. knowledge in law provisions, understanding in the behalf of legal rules, law attitude and behavior of the entrepreneurs to the legal rules.

As a reference for determining the law awareness of the entrepreneurs to the conservation of environment functions by four indicators this mentioned in their application such as

1. Undang-undang no 23 / 1997 concerning the management of life environmental (legislation # 23 / 1997)
2. Keputusan Menteri negara lingkungan hidup No Kep 12 / Men LH / 3 / 1994 concerning general guidance for management of environment and environment monitoring efforts.
(State ministry of environment decision # Kep 12 / Mer LH ? 3 / 1994)
3. Peraturan Pemerintah no 20 / 1990 (Government regulation # 20 / 1990) concerning controlling water pollution.
4. Peraturan daerah Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta no 9 / 1977 (local governmental regulation municipality of Yogyakarta # 9 /1977) concerning conservation right license.
5. Keputusan Walikotamadya Kepala daerah tingkat II Yogyakarta no 037 / KD / 1998 (Municipal Major of Yogyakarta decision # 037 / KD / 1998) concerning procedures in licensing entrepreneur hip location.

All of the five regulations mentioned above are. Law product subjected. To batik home industries in Tamansari Yogyakarta.

By analyzing in juridical and sociological manner using both primary and secondary data. The primary data obtained by observing and interviewing

the respondents (batik entrepreneur) in Tamansari Yogyakarta and the secondary data obtained by literature studies, data from related civil administration authority such as Industrial and Commerce Agency, Health Environment Techniques Board, Statistics Office, Environment division and economy manner division secretary of region municipality of Yogyakarta.

Data obtained then analyzed and compiled to one piece, so that could be seen the connection and relation between law awareness of the entrepreneurs to the conservation of environmental function which based on result attained conclusion as follows:

1. In general, the batik home industry entrepreneur in Tamansari Yogyakarta has reasonable environmental knew knowledge, because of their good education. Most of them have education at high school degree to the college degree. The environmental law enforcement has been full filled by the batik entrepreneurs in Tamansari.
2. The batik entrepreneurs in Tamansari in understanding the obligation especially concerning the material are good enough, so that they obeys the current environmental law provisions. That caused high degree law awareness of the batik entrepreneurs in Tamansari.
3. The batik entrepreneurs 5 attitude and behavior concerning law awareness is high because of the influence of custom cultural in which handed down from the ancestors that is obedience for the Royal authority, including all written and an written rules issued by the Royal authority. Obedience custom to the kraton's rules has motivating them to obey the law provisions also,

4. especially concerning batik industry entrepreneurship.
5. There are several promoting factors in fluencing the law awareness i.e. educational degree, obedience custom condition of lot status belong to the kraton, royal authority demeanor which support conservating environmental function, and governmental effort in realizing conserved environment function. Among the five factors, the main promoting factor is obedience custom of the entrepreneur to the sroyal authority.

The custom handed down from the ancestor since centuries ago is a strong promoting factor, because the custom automatically formed the thinking pattern and attitude on a person since his / her childhood fill the adulthood, in so doing established from a pattern / attitude so strong, cultured, protoonded, and even made fanaticism that sometimes difficult for others to understand. The obedience of the entrepreneurs to the royal authority of Yogyakarta so hard as anything commanded or prohibited by royal authority should be obeyed and done in sincerity manner, including conservation environment function matter.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN	viii
SUMMARY	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	16
1.5. Kerangka Pemikiran	17
1.6. Metode Penelitian	33
1.6.1. Metode Pendekatan	33
1.6.2. Lokasi Penelitian	35
1.6.3. Populasi Dan Sampel Penelitian	36
1.6.4. Sumber Data	41

	Halaman
1.6.5. Prosedur Penelitian Dan Pengumpulan Data	42
1.6.6. Teknik Analisis Data	45
1.6.7. Sistematika Penulisan	46
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 48
2.1. Arti Penting Lingkungan Hidup	48
2.1.1. Pengertian Lingkungan Hidup	48
2.1.2. Perkembangan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia	 52
2.2. Kesadaran Hukum Lingkungan	61
2.3. Penegakan Hukum Lingkungan	65
2.4. Hak Dan Kewajiban Seseorang Terhadap Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dan Hak Untuk Berperan Serta Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup	 73
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 78
3.1. Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	78
3.2. Gambaran Umum Kondisi Wilayah Tamansari	92
3.3. Sejarah Tamansari Yogyakarta	95
3.4. Peraturan Tentang Hukum Lingkungan Bagi Industri Kecil Batik Tamansari	 98

	Halaman
3.5. Kegiatan Produksi Dan Pengolahan Limbah	103
3.6. Kesadaran Hukum Lingkungan Hidup	122
3.6.1. Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Tamansari	122
3.6.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pengusaha Terhadap Pelestarian Fungsi lingkungan Hidup	141
 BAB IV PENUTUP	148
4.1. Kesimpulan	148
4.2. Saran	151
 Daftar Pustaka	152
 Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan dan Luas (km ²) Tahun 1997	80
Tabel 2. Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan Dan Kelurahan, RW, RT Tahun 1997.....	81
Tabel 3. Kepadatan Penduduk Kotamadia Dati II Yogyakarta Hasil Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980 dan 1990	83
Tabel 4. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kodia Yogyakarta Tahun 1993 - 1997.....	84
Tabel 5. Banyaknya Perusahaan Industri Besar/Sedang Kotamadia Dati II Yogyakarta Tahun 1993 - 1997.....	85
Tabel 6. Banyaknya Koperasi di Yogyakarta, Jenis Koperasi, Volume Usaha dan Jumlah Anggota Tahun 1997	86
Tabel 7. Nilai Expor Dan Impor Kotamadia Yogyakarta Tahun 1994- 1997 (US \$)	88
Tabel 8. Data Jenis Usaha Pengguna Bahan Tekstil Kotamadia Yogyakarta Tahun 1997/1998	89
Tabel 9. Laju Inflasi Januari - Juli Tahun 1998 di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1998	91

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bak Pengolahan Limbah Cair	119



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Sesuai dengan amanat GBHN Tahun 1998, bahwa Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kedua diarahkan untuk tetap bertumpu kepada Trilogi Pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lain sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan lebih memberi peran kepada rakyat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan, dijiwai semangat kekeluargaan, didukung oleh stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup.

Secara tersirat dalam isi GBHN Tahun 1998 tersebut di atas bahwa kebijaksanaan tersebut merupakan perwujudan dari konsep pembangunan yang berkelanjutan, hakekat pembangunan adalah pengolahan sumber alam dan sumber dari manusia itu sendiri serta interaksi keduanya yang saling menunjang.

Menurut Effendi, secara konseptual pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi

kepentingan mereka.¹

Membahas pembangunan berkelanjutan, *World Commission on Environment and Development* (WCED) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai: *“development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”*

Dengan demikian, pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

WCED memahami pentingnya perubahan hukum dan kelembagaan hukum yang diperlukan untuk beralih ke pembangunan berkelanjutan dan untuk itu menggariskan tindakan-tindakan yang dipersyaratkan pada tingkat nasional untuk mencapai tujuan tersebut. Tindakan tersebut adalah:

- a. membentuk atau memperkuat badan-badan untuk melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam;
- b. melibatkan masyarakat umum dan masyarakat ilmiah dalam pemilihan kebijaksanaan yang pada dasarnya kompleks dan sulit dari sudut politis;
- c. meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia industri untuk nasehat, asistensi, dan dukungan timbal balik dalam membantu pembentukan dan kebijaksanaan, hukum, dan peraturan guna wujud pembangunan industri yang

¹Effendi S., Sistem Administrasi Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Prisma No.1, LP3ES, Jakarta, Januari 1991. Hal. 7.

lebih berkelanjutan;

- d. memperkuat dan meluaskan konfensi dan perjanjian internasional yang ada untuk menunjang perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan sumber daya alam;
- e. memperbaiki pengelolaan analisis mengenai dampak lingkungan dan kemampuan untuk merencanakan pemanfaatan sumber daya.²

Peranan pemerintah dalam transformasi ini penting dan menentukan, instrumen yang utama yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan proses tersebut adalah sistem administrasi yang biasanya memiliki jangkauan yang luas. Sistem administrasi pembangunan terdiri dari empat unsur yaitu struktur, proses, orientasi dan lingkungan organisasi.

Orientasi pembangunan ini memerlukan dukungan sejumlah infrastruktur seperti sistem politik yang partisipatif, sistem ekonomi yang mampu mengembangkan teknologi secara mandiri, sistem sosial yang harmonis, sistem produksi yang memperhatikan keseimbangan ekosistem serta sistem administrasi yang dinamis dan memiliki kapasitas menyesuaikan diri dengan fungsi lingkungan yang selalu berubah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan tersebut sekaligus mempertahankan kestabilan nasional yang sehat dan dinamis, usaha pembangunan harus mencakup perubahan-perubahan struktural dan normatif serta pembinaan

²)Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Keenam, Gajah Mada University Press, 1994, Hal. 15-16.

kemampuan sosial dan teknis yang baru dalam masyarakat. Karena pembangunan berkelanjutan bukanlah situasi harmoni yang tetap statis, akan tetapi merupakan suatu proses yang selalu berjalan dan bertahap.

Kestabilan nasional yang sehat dan dinamis dalam pembangunan berkelanjutan tentunya tidak lepas dari pembangunan ekonomi. Untuk kesejahteraan rakyat ada fungsi ganda dari pembangunan ekonomi, yakni pada satu sisi berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (*progresif*), sedangkan sisi lainnya dapat memerosotkan kualitas hidup manusia (*regresif*), sehingga pembangunan dapat melakukan perubahan yang bermakna positif dan bermakna negatif.³

Pembangunan yang berkelanjutan dan pembangunan kualitas manusia mengharuskan agar tercipta kondisi yang memungkinkan di mana masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan dan mengontrol penggunaan sumber daya setempat. Sumber daya setempat termasuk sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang ditempati. Karena peranan lingkungan hidup dalam ikut menunjang pembangunan nasional juga sangat besar artinya bagi pembangunan.

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan agar lingkungan hidup tetap berfungsi sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan terwujudnya keseimbangan, keselarasan dan keserasian yang dinamis antara sistem ekologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya agar dapat menjamin pembangunan nasional yang

³Lili Rasjidi dan IB Wiyasa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Cetaka ke-II, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993, Hal. 122.

berkelanjutan.

Pembangunan lingkungan hidup ditujukan untuk melestarikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas hidup, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan melalui pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sumber daya alam: pemanfaatan konservasi kawasan lindung dan kawasan lainnya termasuk ekosistem darat, laut, dan udara, peningkatan rehabilitasi lingkungan hidup yang rusak dan terganggu fungsinya, pengembangan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan ruang, pengendalian pencemaran, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan dan memperbaiki mutu lingkungan hidup; serta meningkatkan kesadaran peran serta, dan tanggung jawab sosial masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan usaha nasional untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dijelaskan dalam Garis Besar Haluan Negara Bab IV Pembangunan Lima Tahun Ketujuh bahwa pembangunan lingkungan hidup telah berhasil meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan proses pembangunan. Namun, kesadaran tentang perlunya kelestarian fungsi lingkungan hidup belum sepenuhnya membudaya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka kesadaran masyarakat pada umumnya dan kesadaran pengusaha pada khususnya sangat diperlukan dalam melestarikan lingkungan hidup karena sangat besar manfaatnya bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.

Di sini tersurat suatu kewajiban generasi sekarang memikul suatu tanggung jawab bahwa generasi mendatang tetap mempunyai sumber dan penunjang bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidupnya, dalam kaitan dengan kepentingan generasi mendatang bahwa sumber-sumber alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan harus dilakukan secara nasional.⁴

Untuk melaksanakan amanat ini sangat diperlukan kesadaran hukum yang tinggi dari pemakai lingkungan dalam menjaga lingkungan hidup yang akan diwariskan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi generasi masa depan.

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sengaja penulis pilih sebagai daerah penelitian karena merupakan daerah wisata yang sangat potensial dengan kerajinan-kerajinannya terutama kerajinan pembuatan batik. Ada salah satu wilayah, yaitu daerah Tamansari di mana terdapat beberapa pengrajin batik tulis maupun batik painting yang masih aktif memproduksi.

Tamansari yang masuk dalam daerah kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton ini banyak melahirkan pelukis-pelukis batik yang sangat terkenal di dalam maupun di luar negeri, sehingga banyak turis asing yang tertarik untuk belajar melukis di Tamansari Yogyakarta ini. Bisnis karya seni batik inilah yang pada akhirnya membawa nama baik Yogyakarta.

⁴Suparni, Niniek, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hal.74.

Kotamadia Yogyakarta sangat strategis ditunjang dengan sarana dan prasarana yang sangat baik dan memadai, antara Kotamadia Yogyakarta dan Kabupaten sekitarnya bahkan sampai daerah Jawa Tengah, sehingga diharapkan Kotamadia Yogyakarta dapat sebagai transito perdagangan dalam rangka pengembangan sektor industri khususnya batik.

Hal ini oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadia Yogyakarta diarahkan untuk :

1. Memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
2. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.
4. Menumbuhkan bakat dan minat dari pengrajin usaha batik.

Secara keseluruhan dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 301 perusahaan industri sedang dan industri kecil, termasuk di dalamnya industri tekstil. Pada produk tekstil ini ada 6 (enam) komoditi yang dibina oleh Departemen perindustrian dan Perdagangan, antara lain yaitu :

1. Batik tulis dan batik cap.
2. Batik lukis / painting.
3. Konfeksi / garmen.
4. Bordir.
5. Modiste.

6. Kain perca / patch work.⁵

Usaha pembinaan yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk mencapai peningkatan bidang ekonomi agar mampu tumbuh menjadi penggerak utama ekonomi daerah serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri.

Dari hasil pembinaan yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, banyak pengusaha batik telah berhasil mengekspor hasil kerajinannya ke negara lain yang berarti memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap masuknya devisa luar negeri ke Indonesia, apalagi pada masa sekarang ini Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi yang belum nampak sampai kapan berakhirnya.

Kondisi perekonomian yang sedang kurang menguntungkan di Indonesia ini akibat dilanda oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan telah banyak melumpuhkan perusahaan industri di Indonesia. Akan tetapi bagi pengrajin batik di daerah Tamansari Yogyakarta justru tidak mengalami perubahan karena walaupun harga bahan baku naik akan tetapi para pengrajin banyak mengekspor hasil kerajinannya langsung ke luar negeri atau banyak dipesan langsung oleh turis-turis manca negara, sehingga bentuk

⁵Wawancara dengan Dra. Ida Farida, Kasubag Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 22 Juni 1998.

pembayarannya langsung dengan nilai dolar sebagai patokannya.⁶

Pada satu sisi perkembangan industri batik di Tamansari Yogyakarta telah meningkat pesat karena merupakan daerah khusus peninggalan jaman dahulu yang sudah turun-temurun sejak abad XVII yang saat itu batik sangat diminati oleh kalangan Kraton sebagai ageman Raja maupun Permaisuri, dengan corak batik tulisnya yang khas sehingga sampai sekarang tetap dilestarikan motifnya.

Selain dampak positif dari kerajinan batik di Tamansari Yogyakarta yang berupa pemasukan devisa bagi negara, penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat setempat, melestarikan warisan budaya leluhur, dan memberikan kemajuan pada laju pertumbuhan ekonomi daerah serta lebih mengenalkan Yogyakarta lewat hasil karya batiknya ke manca negara kepada wisatawan asing yang datang ke lokasi di daerah Tamansari maupun melalui pameran-pameran batik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri, namun pada sisi lain juga memberikan dampak negatif terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup yang bisa bersumber dari limbah pencucian dan pembilasan kain batik yang tidak saja dilakukan oleh industri batik berskala menengah tetapi sebagian besar juga oleh industri batik yang berskala kecil, ataupun yang termasuk industri rumah tangga.

Untuk saling menjaga agar lingkungan hidup tetap baik dan sehat perlu diadakan penilaian secara seksama terhadap dampak perkembangan industri batik terhadap

⁶Wawancara dengan Bp. Mardiyono, Ketua Paguyuban Pengrajin Batik Tamansari, tanggal 24 Mei 1998.

kualitas lingkungan hidup sehingga pengelolaannya dapat dilakukan sedini mungkin agar tidak merusak lingkungan hidup.

Salah satu bentuk pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan menaati peraturan pemerintah. Hukum merupakan instrumen yuridis dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat norma yang mengajak masyarakat untuk dapat mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, dalam hal ini yaitu suatu keadaan lingkungan yang baik dan sehat serta dapat menopang pembangunan yang berkelanjutan. Norma hukum tersebut merupakan gagasan yang abstrak sehingga untuk dapat mendukung terwujudnya pengelolaan lingkungan yang baik dan sehat, maka harus diimplementasikan (*law enforcement*) atau dilakukan penegakan hukum di masyarakat.

Perkembangan fungsi hukum tersebut merupakan suatu interaksi sosial yang akan menimbulkan fenomena sosial dan menyebabkan terjadinya pengaruh timbal balik antara perubahan sosial dan perubahan hukum.

Hal ini berarti hukum ini mempengaruhi berubahnya masyarakat dan perkembangan sosial mempengaruhi perkembangan hukum yang ada.⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dijelaskan pula bahwa penegakan hukum dapat digunakan sebagai kontrol sosial yang bisa dijalankan melalui

⁷Soedjono Dirdjosiswoyo, Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Cetakan II, Alumni, Bandung, 1983, Hal. 26.

model kriminalisasi dan model kerjasama. Penegakan hukum model kerjasama merupakan alternatif yang baik untuk dijalankan lebih dahulu (sebagai tindakan preventif), sedangkan model kriminalisasi lebih merupakan tindakan represif.⁸

Dalam model kriminalisasi, secara formal badan pengontrol adalah suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada yang dikontrol dan yang bisa memaksakan kepatuhannya. Hubungan ini didasarkan pada sikap saling tidak percaya. Sedangkan model kerjasama terdapat dua kekuasaan yang sama peringkatnya (*equal level of authorities*) bekerja bersama-sama untuk tujuan yang sama, dan itu didasari oleh sikap saling percaya.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum model kerjasama lebih cocok dengan paradigma kekeluargaan, musyawarah dan harmoni dalam arsitektur kenegaraan dan hukum dibanding dengan model kriminalisasi, di mana model tersebut merupakan pemaksaan kepatuhan sehingga mensyaratkan adanya ketentuan hukum positif lebih dahulu selanjutnya dilakukan pemaksaan pentaatan. Hal tersebut di lapangan justru tidak efektif karena kurang persuasif dalam melakukan pendekatan.

Lingkungan pengrajin batik Tamansari Yogyakarta termasuk daerah industri kecil. Di sini dalam hal pentaatan peraturan hukum secara tertulis, maupun tidak tertulis sudah cukup baik yang dilakukan tanpa paksaan, dalam kesadarannya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang mereka tempati. Kondisi ini sudah terjadi

⁸Satjipto Rahardjo, Tinjauan Sosiologis Hukum Lingkungan di Indonesia, Jurnal Hukum Lingkungan ICEL, Tahun ke 1 No.1, 1994, Hal. 8.

sejak beberapa tahun yang lalu secara turun-temurun, karena mereka hidup di lingkungan Kraton yang biasa patuh kepada penguasa Kraton.

Walaupun dalam pemenuhan persyaratan perijinan usaha, ada hambatan tentang status tanah yang mereka tempati, sebab tanah yang selama ini mereka gunakan untuk usaha adalah milik Kraton, sehingga tidak dapat memiliki IMB yang dipersyaratkan oleh pemerintah.⁹

Kesadaran hukum dan pengelolaan lingkungan hidup secara eksplisit tercantum dalam GBHN 1993, di mana dikatakan bahwa pembangunan bidang hukum diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menjamin penegakan hukum, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional, yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Pada bagian lain dinyatakan bahwa sumber alam di darat, di laut maupun di udara dikelola dan dimanfaatkan dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan agar dapat mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai untuk memberikan manfaat bagi generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Sehubungan dengan itu perlu ditumbuhkembangkan kesadaran maupun pemahaman tentang pengetahuan hukum lingkungan agar lingkungan hidup dapat selalu terjaga pelestariannya. Pelestarian fungsi lingkungan telah menjadi suatu hal yang pokok dalam turut serta menunjang pembangunan nasional. Untuk itu

⁹Wawancara dengan Bp. R Wedono Lukito Danarto, Pamong Kraton Yogyakarta, tanggal 25 April 1998.

pengelolaan lingkungan sangat diperhatikan oleh pemerintah maupun cendekiawan pengamat lingkungan.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut ikut mensukseskan pembangunan nasional yang berkelanjutan, karena itu pengelolaan lingkungan hidup harus penuh dengan kesadaran serta tanggung jawab pemerintah, warga masyarakat dan pengusaha dalam menaati aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis.

Secara nyata industri batik mempunyai potensi dapat menimbulkan pencemaran lingkungan khususnya di daerah Tamansari Yogyakarta yang keberadaannya sudah ada dari tahun ke tahun secara turun-temurun, maka dalam penelitian ini peneliti akan menelaah bagaimana kesadaran hukum pengusaha batik dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup di Tamansari Yogyakarta.

1.2. PERUMUSAN MASALAH.

Bab V, Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No: 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut di atas telah memberi landasan hukum kepada pengusaha maupun masyarakat dalam hal pengelolaan fungsi lingkungan hidup.

Untuk itu tentunya masyarakat harus dapat memahami akan pentingnya keberadaan hukum di masyarakat.

Di samping itu perlu peran serta masyarakat di daerah itu dalam pengelolaan lingkungan hidup agar bisa didayagunakan sebaik-baiknya.¹⁰

Pada hakekatnya hukum mengandung ide-ide, nilai-nilai atau pesan tertentu yang hendak diwujudkan dalam masyarakat. Hukum merupakan pedoman hidup yang normatif bagi negara dan warga negaranya.¹¹

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Secara nyata disadari bahwa industri batik tersebut apabila tidak diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Upaya peningkatan kesadaran hukum dan penegakan hukum dalam hal ini sangat diperlukan karena kesadaran hukum yang tinggi akan menimbulkan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang pada gilirannya akan menunjang keberhasilan pengelolaan lingkungan.

Dengan mempertimbangkan daya guna dan hasil guna penelitian, maka secara khusus penelitian ini dibatasi pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha industri batik antara lain pendidikan, pemahaman, dan sikap serta perilaku dari pengusaha (pengrajin batik) Tamansari Yogyakarta.

¹⁰Koesnadi Hardjasoemantri, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cetakan Keempat, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, Hal. 16.

¹¹Esmi Warassih, Keefektifan Hukum Dalam Menanggulangi Pencemaran Air, Laporan Hasil Penelitian, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, Hal. 4.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum pengusaha dilihat dari indikator mengenai pengetahuan hukum lingkungan.
2. Kesadaran hukum pengusaha dilihat dari indikator pemahaman hukum terutama dari segi isi peraturan hukum lingkungan.
3. Kesadaran hukum pengusaha dilihat dari indikator sikap hukum yaitu bagaimana tentang penilaian mereka terhadap hukum.
4. Kesadaran hukum pengusaha dalam melestarikan fungsi lingkungan dilihat dari indikator perilaku hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

1.3. TUJUAN PENELITIAN.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pemahaman secara jelas mengenai kesadaran hukum pengusaha dalam melestarikan fungsi lingkungan.

Jika dikaitkan dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Mengetahui bagaimana kesadaran hukum pengusaha dilihat dari indikator pengetahuan hukum lingkungan.
- 1.3.2. Mengetahui bagaimana kesadaran hukum pengusaha dilihat dari indikator pemahaman hukum terutama dari segi isi peraturan hukum lingkungan.

- 1.3.3. Mengetahui bagaimana kesadaran hukum pengusaha dilihat dari indikator sikap hukum yaitu bagaimana tentang penilaian mereka terhadap hukum.
- 1.3.4. Mengetahui bagaimana kesadaran hukum pengusaha dalam melestarikan fungsi lingkungan dilihat dari indikator perilaku hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

1.4. MANFAAT PENELITIAN.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat ilmiah.

1.4.1. Manfaat praktis

- a. Melalui kesadaran hukum pengusaha dapat tercipta pelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya pada industri kecil batik di Tamansari Yogyakarta.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana bagi peneliti untuk dapat memperdalam pengetahuan mengenai kesadaran hukum pengusaha terhadap pelestarian fungsi lingkungan.

1.4.2. Manfaat Ilmiah

Diharapkan hasil penelitian dapat menghimpun informasi faktual yang berhubungan dengan kesadaran hukum pengusaha dalam melestarikan fungsi lingkungan.

1.5. KERANGKA PEMIKIRAN

Kesuburan tanah dapat diteliti secara kuantitatif dengan melihat kemampuan tanah, biarpun pada kenyataannya tidak semua wilayah di Indonesia menunjukkan kriteria wilayah yang subur, akan tetapi pada umumnya tanah di sini mempunyai kesuburan fisik yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehubungan dengan hal itu, lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya.¹²

Pelestarian fungsi lingkungan adalah merupakan faktor yang penting sebagai penyangga kehidupan di bumi ini dan memberi manfaat yang besar bagi kesejahteraan umat manusia, untuk itu pembinaan dan kesadaran hukum dari masyarakat sangat diperlukan demi untuk kepentingan bersama.

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi

¹²⁾Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan Hidup, Cetakan I Reneka Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 65.

kerusakan serta pencemarannya. Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup haruslah dilakukan secara bersama dengan kesadaran diri masing-masing guna melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini juga diharapkan terjadi di lingkungan industri kecil Batik Tamansari Yogyakarta, di mana pada saat ini industri batik sangat mengalami penurunan produksi karena situasi ekonomi Indonesia yang sedang mengalami krisis yang berkepanjangan.

Peran pengusaha batik dalam memahami dan sekaligus mempraktekkan di lapangan, apa yang terkandung dalam materi hukum lingkungan, merupakan salah satu syarat utama bagi keberhasilan usaha pengendalian dan pelestarian fungsi lingkungan. Dalam menuju keberhasilan tentunya tidak lepas dari peran hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berlaku sejak 19 September tahun 1997 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982, yang memberikan dasar hukum bagi masyarakat pada umumnya dan pengusaha pada khususnya untuk lebih memahami dan mematuhi hukum lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hal itu maka, perlu dikaji tentang penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga para pengusaha maupun masyarakat dapat berkiprah dalam penegakan hukum secara optimal dan konsisten.

Pengertian pengelolaan lingkungan hidup dipertegas dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir kedua menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Berdasarkan pengertian di atas diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik, dan mendukung program pemerintah dalam upaya kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan-penyuluhan, kursus-kursus dan kegiatan-kegiatan lain yang pada intinya tetap menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup agar tetap terjaga dari kerusakan.

Dalam melestarikan lingkungan hidup ini tentunya tidak lepas dari peranan kesadaran hukum dari pengusaha pada khususnya.

Kesadaran hukum adalah konsep-konsep abstrak dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.¹³

Pengertian kesadaran hukum juga ditulis oleh Aminah yaitu bahwa kesadaran hukum adalah suatu konsep abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara

¹³Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, Jakarta, 1982, Hal. 159.

tetertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya, yaitu yang tertera di dalam ketentuan-ketentuan hukum lingkungan, oleh karena itu yang dimaksud dengan kesadaran hukum di sini juga erat kaitannya dengan kesadaran lingkungan.¹⁴

Kesadaran hukum pengusaha tentunya juga tidak lepas dari aturan-aturan hukum yang mengikat. Karena dengan timbulnya kemauan untuk melindungi dan merawat serta memelihara lingkungan hidup, maka tumbuh dan berkembang pula makna hukum lingkungan dalam kehidupan manusia.¹⁵

Betapa besar makna hukum lingkungan untuk kehidupan manusia bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari ulah manusia itu sendiri akan merupakan suatu kerugian yang besar, yang tak ternilai harganya. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk pada saat ini apalagi ditambah dengan kondisi lingkungan hidup yang tak terawat tentunya akan menambah penderitaan rakyat.

Kondisi masih banyaknya kesemrawutan kawasan industri dan lokasi permukiman dan perumahan merupakan bukti nyata adanya pemahaman hukum

¹⁴Aminah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pengusaha Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Kodya Pekalongan, Jakarta, 1997, Hal. 44.

¹⁵St, Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku I : Umum, Cetakan II, Bina Cipta, Bandung, 1985, Hal 95.

lingkungan yang kurang, sehingga perlu ditata kembali tata kota agar tak ada kerancauan antara kawasan industri dan lokasi pemukiman.¹⁶

Pemahaman hukum lingkungan diperlukan untuk penataan lokasi pemukiman maupun kawasan industri agar tidak terjadi ketidak harmonisan tata guna lingkungan yang pada akhirnya akan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan hidup.

Dalam kaitan ini penulis sengaja meneliti secara langsung kesadaran hukum pengusaha industri kecil batik di kawasan Tamansari Yogyakarta. Karena industri batik di Tamansari Yogyakarta ini merupakan industri yang sudah dilakukan semenjak jaman dahulu secara turun temurun. Hasil kerajinan batik dari Tamansari inipun juga sudah menembus ke pasaran di luar negeri sebagai penambah devisa negara. Dengan melihat data dan kenyataan di lapangan tentang kesadaran hukum pengusaha batik terhadap lingkungan hidup akan terjawab sejauh mana kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pengusaha Tamansari Kecamatan Kraton Yogyakarta.

Karena hukum adalah suatu aturan yang harus dipatuhi dan apabila dilanggar tentunya akan membahayakan kehidupan masyarakat maupun negara.

Jadi alam, lingkungan dan manusia diharapkan dapat bersama-sama saling memberikan kemampuannya dan kegunaannya sehingga tujuan kehidupan yang baik dan sehat dapat

¹⁶Johara T. Jayadinata, Tata Guna Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah, ITB Bandung, Cetakan I, Hal 23.

tercapai tanpa suatu hambatan atau gangguan yang berarti.

Dalam mempelajari tentang kesadaran hukum pengusaha di lingkungan pengrajin batik Tamansari Yogyakarta selain penulis melakukan kajian terhadap undang-undang hukum lingkungan yang berlaku juga melakukan wawancara langsung dengan Pimpinan Paguyuban Batik di daerah Tamansari dan pada beberapa ketua kelompok kecil di sana sehingga diperoleh data dan kelengkapan informasi secara akurat.

Mengapa selalu diinginkan lingkungan hidup yang baik dan tidak tercemar, karena bila ada pencemaran lingkungan tentu ada pihak lain yang dirugikan karena pencemaran itu, terutama di lingkungan industri-industri yang rawan dengan pencemaran.

Emil Salim telah memperkirakan setiap industri berpeluang berpotensi menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan.¹⁷

Pada perusakan dan pencemaran lingkungan hidup tentunya ada korban yang selalu dirugikan. Kerugian ini sebagai akibat karena kesadaran hukum dari seseorang ataupun pengusaha masih belum memadai sehingga dapat menimbulkan suatu kerugian.

¹⁷Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Cetakan VI, 1993, Jakarta, Hal 49.

Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Ayat (2) mengatakan bahwa selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagai dimaksud ayat (1), hukum dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Mencermati isi pasal tersebut di atas setiap pelaku penyimpangan terhadap undang-undang lingkungan hidup wajib bertanggung jawab atas segala kesalahan yang diperbuat. Untuk itu pengelolaan lingkungan hidup yang baik merupakan upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup, khususnya untuk wilayah industri kecil batik Tamansari Yogyakarta, karena pada prinsipnya sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya wajib memelihara pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pada ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau

kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Jelas bahwa upaya penegakan hukum lingkungan yang perlu diperhatikan dalam konteks Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

1. Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
3. Setiap orang wajib memberikan informasi yang benar dan akurat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk itu diperlukan kesadaran hukum yang tinggi bagi pengusaha batik Tamansari Yogyakarta karena betapa pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan sehat.

1.5.1. Kesadaran Hukum

Diamanatkan GBHN Tahun 1998 pada Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Ketujuh bahwa pembangunan di bidang hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang

meliputi pembangunan materi hukum, aparatur hukum, saran dan prasarana hukum, serta budaya hukum sebagai perwujudan negara hukum yang lebih menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih tertib, aman dan tenteram. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan mencakup upaya peningkatan kesadaran hukum, kepastian hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar.

Dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan tertib ini peranan hukum sangatlah penting.

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.¹⁸

Kehidupan masyarakat memerlukan adanya ketertiban yang diperlukan terutama untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan

¹⁸Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 13.

hidup manusia, bahwa kedamaian tersebut berarti di satu pihak adanya ketertiban (yang bersifat lahiriah/ ekstern antar pribadi) dan di lain pihak adanya ketentraman (yang bersifat batiniah/intern pribadi).

Tujuan kaedah hukum berkaitan erat dengan tugas hukum yaitu suatu pemberian kepastian hukum dan pemberian kesebandingan hukum. Pemberian kepastian hukum tertuju pada ketentraman. Terciptanya suatu ketentraman di masyarakat tentunya sangat erat dengan adanya kesadaran hukum yang ada pada lingkungan masyarakat tersebut, karena hukum adalah sebagai alat untuk mengatur masyarakat.¹⁹

Pada masyarakat yang sangat majemuk ini perlu adanya suatu tata kehidupan yang tentram, damai dan terlindungi. Karena itu butuh suatu ketertiban di dalam masyarakat. Ketertiban ini erat hubungannya dengan kesadaran masyarakat itu sendiri dalam berperilaku dalam kehidupannya.

Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan/atau hukum yang tidak baik. Jadi, kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, Hal. 6.

tidak timbul.²⁰

Kesadaran hukum yang merupakan suatu konsep abstrak dalam diri manusia ini tentunya juga sangat erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat terhadap fungsi lingkungan hidupnya.

Masalah ini dipertegas oleh Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diarahkan agar menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, ketersediaan informasi yang berkenaan dengan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup dikembangkan dan diperluas sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat lebih meningkat.²¹

Kualitas lingkungan hidup akan meningkat bila didukung oleh adanya kesadaran hukum baik dari masyarakat, pengusaha maupun pemerintah.

Pada penelitian ini penulis akan membahas tentang kesadaran hukum pengusaha terhadap fungsi lingkungan. Menurut Soerjono

²⁰Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, CV Rajawali Press, Jakarta, 1982, Hal. 211.

²¹Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Keenam, Gajah Mada University Press, 1997, Hal. 70.

Soekanto, bahwa indikator-indikator kesadaran hukum hanyalah dapat terungkap, apabila seseorang mengadakan penelitian yang seksama terhadap gejala tersebut.

Indikator *pertama* adalah pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui, bahwa perilaku-perilaku tertentu, diatur oleh hukum. Sudah tentu, bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis.

Indikator *kedua* adalah pemahaman hukum, artinya seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya.

Indikator *ketiga* adalah sikap hukum, artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

Indikator *keempat*, adalah perilaku hukum, artinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi.²²

²²Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, CV Rajawali Press, Jakarta, 1982: Hal. 28-229.

Dengan demikian adanya kesadaran hukum yang tinggi dari pengusaha tentunya akan tercipta suatu lingkungan hidup yang baik dengan pengusaha menyadari akan pentingnya pemahaman pengetahuan tentang hukum lingkungan khususnya dengan pasti lingkungan hidup akan terjaga kelestariannya karena hukum dapat dilihat sebagai alat yang digunakan secara sadar oleh manusia di dalam masyarakat untuk merubah lingkungan hidupnya.²³

1.5.2. Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup

Ditegaskan oleh GBHN Tahun 1998 pada asas pembangunan Nasional yang tercantum dalam asas manfaat disebutkan, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

²³Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1980, Hal. 12.

Kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup perlu diusahakan demi perluasan dimensi pembangunan itu sendiri. Pembangunan bukan hanya penting untuk meningkatkan taraf hidup dalam arti material, melainkan juga dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan yang hakiki.

Industri merupakan salah satu sektor pembangunan yang dikembangkan untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah guna memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Industri bank merupakan salah satu kegiatan industri yang dilakukan baik dalam skala menengah maupun skala kecil. Kegiatan ini dilakukan oleh pengusaha yang mempunyai pengalaman, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan yang berbeda. Oleh karena itu hukum lingkungan merupakan pedoman bagi pengusaha, khususnya pengusaha batik di lingkungan Tamansari Yogyakarta dalam menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Melestarikan fungsi lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Hal ini ditegaskan oleh Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa lingkungan hidup mempunyai fungsi penyangga perikehidupan yang amat penting. Oleh

karena itu pengelolaan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsurnya secara terus menerus. Dengan demikian mutu dan fungsinya dapat dipelihara dan ditingkatkan untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.²⁴

Pelestarian fungsi lingkungan hidup haruslah dilakukan secara bersama-sama, baik dari peran serta masyarakat, pengusaha maupun pihak pemerintah dengan serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Dalam resolusi khusus, konferensi Stockholm menetapkan tanggal 5 Juni sebagai "Hari Lingkungan Hidup Sedunia". Diselenggarakannya konferensi Stockholm tersebut merupakan titik kulminasi perbincangan mengenai lingkungan hidup manusia, dan

²⁴Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Edisi Pertama, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, Hal. 16.

memberikan gema ke seluruh dunia.²⁵

Hal tersebut bersamaan dengan berkembangnya perhatian dan kesadaran tentang lingkungan hidup di Indonesia yaitu dengan melalui Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1990 diresmikan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan untuk menangani kerusakan lingkungan hidup. Adanya badan tersebut juga menunjukkan semakin nyata kesungguhan Pemerintah untuk mengatur sekaligus menindak para pihak yang mencemari lingkungan.

Upaya pelestarian fungsi lingkungan tentunya melibatkan berbagai komponen di antaranya peran masyarakat. Di sini peran masyarakat sangat membantu dalam pengelolaan lingkungan.

Peran serta masyarakat merupakan salah satu syarat utama bagi keberhasilan usaha pengendalian dan pelestarian fungsi lingkungan. Oleh karena itu, akses masyarakat kepada sumber daya alam dan kemudahan memperoleh modal usaha ditingkatkan agar dapat memberi peluang yang lebih besar kepada masyarakat dalam pengendalian dan

²⁵Ninie Suparmi, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hal. 22.

pelestarian fungsi lingkungan.²⁶

Peran serta masyarakat memang sangat diperlukan, sebab dengan adanya peran serta masyarakat yang terpadu bersama pemerintah akan tercipta lingkungan hidup yang aman, serasi dan sehat.

1.6. Metode Penelitian.

1.6.1. Metode Pendekatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis.

Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu, pendekatan terhadap hukum dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku-prilaku anggota masyarakat yang mempola.²⁷

Adapun alasan digunakannya metoda pendekatan ini karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku yang nyata dari manusia itu sendiri, yang mengacu pada

²⁶Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Keenam, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, Hal. 69.

²⁷Ronny Hanityo Soemitro, Majalah Masalah Hukum, No.9, 1991, Hal. 44.

norma-norma sosial dan hukum yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena melalui penelitian metode kualitatif ini diharapkan dapat dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Adapun alasan mengapa penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena :

1. Penelitian ini ingin menjelaskan tentang kesadaran hukum pengusaha batik Tamansari Yogyakarta dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup.
2. Penelitian ini ingin menjelaskan pula adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.²⁸
3. Dalam menggunakan penelitian kualitatif, peneliti tidak mengandalkan diri pada angka-angka yang merupakan reduksi

²⁸)Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, Hal.4.

dari berbagai perilaku manusia, tetapi pemahamannya pada “makna” yang diberikan oleh subyek penelitiannya pada berbagai situasi yang dialami (“natural setting”).²⁹

Adapun tahap-tahap penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tahap orientasi/eksplorasi yang bersifat menyeluruh.
2. Tahap melakukan eksplorasi secara terfokus.
3. Tahap mengecek atau mengkonfirmasi hasil temuan penelitian.³⁰

1.6.2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di daerah Tamansari Kecamatan Kraton.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal dengan daerah

²⁹Harkristuti Harkrisnowo, Metodologi Penelitian Dalam Kriminologi : Berbagai Alternatif, Makalah yang disampaikan dalam penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, FH Undip, Bandung, 14-29 Nopember 1994, hal.8.

³⁰Sanapiah Faisal, Penelitian Kulitatif Dasar-dasar Dan Aplikasi, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990, Hal. 45.

wisata dan merupakan salah satu pusat perkembangan industri batik nasional.

Bahwa batik yang pada awalnya diproduksi secara tradisional dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana, sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin maju, industri batikpun ikut berkembang dengan pesatnya baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

2. Prospek pengembangan industri batik di Yogyakarta sangat baik, karena selain merupakan pekerjaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun, juga karena pembuatan batik itu ada unsur jiwa seninya dan kebanyakan masyarakat Yogyakarta masih menghargai dan menyukai akan sesuatu yang ada hubungannya dengan seni, termasuk seni membatik.
3. Industri batik sebagian besar diproduksi oleh industri kecil yang masih banyak membutuhkan bantuan baik dana maupun pembinaan-pembinaan dari pihak pemerintah, khususnya Departement Perindustrian Dan Perdagangan.

1.6.3. Populasi Dan Sampel Penelitian.

Populasi penelitian atau *universe* adalah seluruh obyek atau

seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau unit yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu.³¹

Penulis maksudkan dalam populasi penelitian ini adalah pengusaha industri kecil batik yang tersebar di seluruh wilayah Tamansari Yogyakarta.

Adapun karakteristik industri kecil batik Tamansari yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Merupakan perusahaan perseorangan dengan pengelolaan secara kekeluargaan dan bergelombang secara turun-temurun.
2. Rata-rata modal yang dimiliki di bawah Rp. 50 juta.
3. Tenaga kerja yang dimiliki kebanyakan antara 5 sampai 50 orang.
4. Sistem produksinya secara manual.
5. Pengelolaan bukan dilakukan secara sederhana sesuai petunjuk Departemen Perindustrian dan Perdagangan, bahkan ada beberapa yang tidak mengadakan pengelolaan limbah.
6. Sentra-sentra industri kecil batik di Tamansari selalu mendapat

³¹⁾Ronny Hanityo Soemitro, Metodologi Penelitian hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal. 44.

binaan dari kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Yogyakarta.

Dikatalan oleh Ronny Hanityo Soemitro, bahwa dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.

Populasi tidak selalu harus berwujud manusia saja, tetapi dapat berupa gejala-gejala, tingkah-laku, pasal perundang-undangan, kasus-kasus hukum, alat-alat pengajaran, cara-cara penyelenggaraan administrasi dan lain-lain.³²

Dengan tidak perlu meneliti semua kejadian maka penulis di sini menggunakan *purposive sampling* yaitu : penarikan sampling bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu, yaitu secara sengaja, karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya dari penulis.

Maka penulis mengambil ketua-ketua kelompok atau informan-informan tertentu sentra industri kecil batik Tamansari Yogyakarta,

³²) Ronny Hanityo Soemitro, *Op. Cit.*, Hal. 45.

yang secara rinci dapat mewakili keseluruhan pengusaha sentra batik di Tamansari.

Dalam menulis subyek-subyek sampelnya diambil anggota-anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut bebar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang sudah dikenal sebelumnya yaitu dalam hal ini adalah pengusaha batik di Tamansari Yogyakarta.

Pada prinsipnya tidak ada peraturan-peraturan yang ketat untuk secara mutlak menentukan berapa persen sampel harus diambil dari populasi. Namun pada umumnya orang berpendapat bahwa sampel yang berlebihan itu lebih baik daripada kekurangan sampel (*"over sampling is always better than under sampling"*). Biasanya orang menentukan besar kecilnya sampel itu atas pertimbangan-pertimbangan praktis saja, misalnya mengingat pembimbing atau sponsor, besarnya biaya pengeluaran, kesempatan dan limit waktu yang diberikan, kemampuan fisik dan intelektual dari peneliti sendiri, ciri khas fenomena sosial yang akan digarap, dan lain-lain.

Dalam hal ini penulis dalam penelitian ini mengambil sampel 14 orang dari 64 orang pengusaha batik di wilayah Tamansari Yogyakarta.

Adapun informan-informan sebagai responden yang telah penulis wawancarai adalah :

1. Kepala Sub Bagian Departemen Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Staf Biro Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Staf Kantor Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Staf Setwilda Tingkat II Kotamadya Yogyakarta, khususnya Kabag Hukum.
5. Dua orang penyuluh pembinaan bidang industri kecil Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Kabag Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Yogyakarta.
7. Seorang Ketua Paguyuban Industri Kecil Batik Tamansari Yogyakarta.
8. Ketua RW Tamansari Kecamatan Kraton Yogyakarta.
9. Pamong Kraton Yogyakarta.
10. Empat belas orang pengusaha batik Tamansari Yogyakarta.

Adapun 14 orang pengusaha batik yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

No.	N a m a	Alamat
01	Drs. Hadjir Digdo	Taman KT I/314
02	Budi Nito	Taman KT I/416
03	Pramusinto	Taman KT I/231
04	Sarjiman	Taman KT I/259
05	Sumartono	Taman KT I/259
06	Mardiyono	Taman KT I/286
07	Suroyo	Taman KT I/281
08	Sudarmanto	Taman KT I/293
09	Basuki Widodo	Taman KT I/287
10	Sudarmaji	Taman KT I/278
11	R Mintolo	Taman KT I/462
No.	N a m a	Alamat
12	Basuki	Taman KT I/467
13	St. Sugeng Saharjo	Taman KT I/433
14	Hadi Warsito	Taman KT I/466 A

1.6.4. Sumber Data.

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1.6.4.1. Sumber Data Primer.

Bahan data primer, merupakan hasil wawancara langsung dari para responden yang menjadi sampel penelitian itu, yang telah penulis sebutkan di atas.

1.6.4.2. Data Sekunder.

Yaitu penulis peroleh dari : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Hukum Lingkungan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan lingkungan hidup, makalah-makalah yang ada hubungannya dengan lingkungan hidup serta tulisan ilmiah lain yang menunjang masalah yang sedang diteliti.

1.6.5. Prosedur Penelitian Dan Pengumpulan Data.

Pada prosedur penelitian akan penulis bahas sebagai berikut :

1.6.5.1. Prosedur Penelitian.

1. Penelitian Pustaka.

Pada tahap awal penulis pelajari terlebih dahulu buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan judul yang penulis ambil yang ada kaitannya dengan hukum lingkungan. Juga penulis pelajari pula apa yang

diungkap oleh pemberitaan dan media masa cetak maupun elektronik tentang permasalahan hukum lingkungan di Indonesia, sehingga dapat menambah pengetahuan penulis tentang materi lingkungan hidup.

2. Penelitian Lapangan.

Pada penelitian lapangan dilakukan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan.

Pada tahap awal ini penulis mengajukan judul tesis pada Ketua Program Magister Ilmu Hukum dan setelah disetujui judul tersebut, selanjutnya ditunjuk seorang pembimbing penulisan tesis yang bidang ilmunya sesuai dengan judul yang diambil oleh penulis.

Kemudian penulis mengajukan proposal tesis sesuai dengan judul yang telah disetujui. Setelah proposal disetujui oleh team penguji proposal, penulis mengurus ijin riset untuk penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan.

Setelah memperoleh surat ijin riset, penulis mulai

melakukan pengumpulan data lapangan sesuai dengan sesuai dengan proposal tesis.

c. Tahap Penyelesaian.

Setelah semua data dari lapangan maupun dari buku-buku literatur terkumpul, maka penulis mulai melakukan editing data, kemudian dianalisis dan kemudian dibuat laporan akhir.

1.6.5.2. Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data, penulis gunakan metode interview atau wawancara.

Yang dimaksud dengan interview di sini adalah metoda pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistimatik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.³³

Selain wawancara, di sini penulis juga menggunakan :

1. Wawancara terukur,
2. Wawancara mendalam,

³³)Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid dua, Andi Offset, Yogyakarta, 1994, Hal. 193.

3. Observasi terlibat/terbatas,
4. Studi kepustakaan.³⁴

Dalam pengumpulan data ini antara penulis sebagai peneliti dan responden dapat terkesan lues dan tidak kaku, sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Karena antara penanya dan yang ditanya dapat saling terbuka dalam arah pembicaraan.

1.6.6. Teknik Analisis Data.

Data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini, baik dari data primer maupun data sekunder dijadikan satu untuk dianalisis dengan menggunakan metoda analisis kualitatif, karena penelitian ini tidak menggunakan rumus statistik dan matematik dalam mengukur variabel yang diteliti.

Teknis analisis penelitian ini dilakukan secara yuridis sosiologis dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder.

Data primer berupa hasil wawancara serta kenyataan di lapangan merupakan hasil pengamatan langsung dengan pengusaha batik dan beberapa instansi yang terkait yang ada hubungannya dengan

³⁴⁾Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, Hal. 240.

penanganan lingkungan hidup.

Untuk data sekunder, disajikan hasil studi kepustakaan tentang hukum lingkungan mulai dari pengertian atau definisi, teori sampai dengan pelestarian fungsi lingkungan dari berbagai literatur maupun tulisan ilmiah yang ada.

Setelah data primer dan data sekunder diolah menjadi satu bagian yang saling kait mengkait dan tak terputus, dengan demikian akan terlihat benang merahnya antara kesadaran hukum pengusaha terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup.

1.6.7. Sistematika Penulisan.

Keseluruhan penulisan tesis ini, disajikan dalam 4 Bab, dengan perincian sebagai berikut. Setelah Bab I : Pendahuluan, pada Bab II akan terurai mengenai arti penting lingkungan hidup, pengertian lingkungan hidup, perkembangan hukum lingkungan hidup di Indonesia, pengertian hukum lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup serta hak dan kewajiban seseorang terhadap lingkungan hidup.

Kemudian dilanjutkan pada Bab III sebagai hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan intisari dari studi lapangan tentang

kesadaran hukum pengusaha terhadap fungsi lingkungan hidup, dengan diawali dari sejarah gambaran umum batik Tamansari, peraturan tentang hukum lingkungan bagi industri kecil batik Tamansari, kesadaran hukum pengusaha serta faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha, serta hasil wawancara dengan Ketua Paguyuban Batik Tamansari dan beberapa staf pimpinan instansi terkait yang menangani masalah lingkungan hidup.

Akhirnya pada Bab IV berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian tesis ini.

Dari sistematika penulisan inilah diharapkan diperoleh informasi yang diperlukan oleh para pembaca, khususnya para pembaca yang mempunyai minat terhadap hukum lingkungan hidup.

Hukum lingkungan hidup memang masih perlu dibahas secara detail maupun secara luas, karena lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari segala aktivitas kehidupan manusia bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. ARTI PENTING LINGKUNGAN HIDUP

2.1.1. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum nasional sebagai sarana ketertiban dan kesejahteraan masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran harus dapat berperan mengayomi masyarakat serta mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Sesuai dengan GBHN tahun 1993, dalam mengatur pelestarian fungsi lingkungan hidup yang baik dan sehat tentunya juga harus diatur oleh tatanan undang-undang yang berlaku.

Berbicara mengenai masalah lingkungan hidup tentunya tidak lepas dari hukum yang mengatur. Pengertian hukum adalah aturan yang tertulis dan yang tidak tertulis yang mengatur segenap penyelenggaraan kehidupan nasional, yaitu aturan yang bersifat mengikat tidak hanya semua lembaga negara tetapi juga masyarakat keseluruhannya.

Pengertian hukum juga dipertegas oleh Purnadi Purbocaroko dan Soerjono Soekanto. Definisi hukum yaitu hukum sebagai ilmu pengetahuan, disiplin, tata hukum, petugas hukum, keputusan penguasa, proses pemerintahan, perilaku ajeg, jalinan nilai-nilai serta sikap tindak

yang teratur.³⁵

Oleh St. Munadjat Danusaputro disebutkan, bahwa hukum adalah pranata sosial yang berupa suatu perangkat kaidah guna mengatur tingkah laku manusia demi untuk melindungi kepentingan antar manusia secara tertib dan damai.³⁶

Dengan melihat beberapa pengertian hukum di atas dapat disadari betapa pentingnya peran hukum di masyarakat agar tercipta suatu ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan yang secara nyata dapat digunakan sebagai pegangan, termasuk di dalamnya hukum lingkungan.

Pengertian hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur antara manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan lingkungan alam sekitar.³⁷

Oleh Hermien Hadiati Koesmadji disebutkan bahwa hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup berupa ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup

³⁵Purnadi Purbocaroko Dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Cetakan I, Alumni Bandung, 1986, Hal. 6.

³⁶St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku IV: Global, Bina Cipta, Bandung, 1979, Hal. 15.

³⁷Harun M. Husein, Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya, Cetakan II, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, Hal. 38.

termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.³⁸

Menurut St. Munadjat Danusaputra, disebutkan bahwa hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan.³⁹

Pengertian hukum lingkungan juga dipertegas oleh Koesnadi Hardjasoemantri, disebutkan bahwa hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti yang seluas-luasnya.⁴⁰

Dari beberapa pengertian di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur dan berhubungan dengan lingkungan hidup dan bertujuan untuk kesejahteraan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan adanya hukum lingkungan yang ditaati bersama maka dapat tercegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dengan tercegahnya kerusakan lingkungan hidup tentunya

³⁸) Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, Citra Aditya Bakti, Cetakan I, 1993, Hal. 4.

³⁹) St. Munadjat Danusaputra, Hukum Lingkungan Bagian I: Umum, Bina Cipta, Bandung, 1981, Hal. 67.

⁴⁰) Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Cetakan V, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, Hal. 14.

akan tercipta suatu kedamaian dan kesegaran suasana.

Pemeliharaan lingkungan hidup merupakan salah satu kewajiban warga masyarakat seperti yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No:23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi bahwa setiap orang berkewajiban memelihara pelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dengan demikian jelas kiranya setiap orang sebagai anggota masyarakat yang baik tentunya harus ikut berperan dalam kepedulian pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan sehat.

Dalam suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antara lingkungan hidup. Stabilisasi keseimbangan serta keserasian antar komponen tersebut tergantung usaha manusia karena manusia sebagai komponen pendukung lingkungan hidup paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan hidup.⁴¹

Hal ini merupakan suatu harapan bangsa Indonesia memiliki lingkungan hidup yang baik, serasi dan seimbang antara komponen-

⁴¹⁾Harun M Husein, Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan II, 1995, Hal. 16.

komponen lingkungan hidup yang ada.

2.1.2. Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia.

Pikiran yang terkandung dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam GBHN Tahun 1998 antara lain mengutarakan :

“Bangsa Indonesia menghadapi keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, keselarasan hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat, kerana kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir Pembangunan Nasional, secara ringkas disebut masyarakat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila”.

Arahan dalam GBHN Tahun 1998 ini mencerminkan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang merupakan refleksi mutlak daripada kepribadian Indonesia yang hidup serasi sejak proklamasi 17 Agustus 1945.

Kewajiban memelihara kemampuan lingkungan hidup dan kewajiban generasi sekarang terhadap generasi mendatang sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam GBHN Tahun 1998 dinyatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus dilaksanakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang”.

Arahan GBHN tersebut merupakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu perlu ada kepastian hukumnya dalam mengelola lingkungan hidup.

Karena pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pribadi perorangan, masyarakat, pengusaha dan pemerintah.

Konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia (*“United Nations Conference on the Human Environment”*) diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5 - 16 Juni 1972. Pada akhir sidang konferensi mensahkan hasil-hasilnya berupa :

1. Deklarasi tentang lingkungan hidup manusia (*“Declaration of the Human Environment”*) terdiri atas preambule, yang terdiri atas tujuh pernyataan, dan 26 asas. Deklarasi ini juga dikenal sebagai Deklarasi Stockholm (*“Stockholm Declaration”*).

2. Rencana aksi lingkungan hidup manusia ("*Action Plan*") terdiri atas 109 rekomendasi termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia.
3. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan rencana aksi tersebut di atas terdiri atas :
 - A. Dewan Pengurus ("*Governing Council*") program lingkungan hidup ("*United Nations Environment Programme = UNEP*")
 - B. Sekretariat, yang dikepalai oleh seorang Direktur Eksekutif.
 - C. Dana lingkungan hidup.
 - D. Badan koordinasi lingkungan hidup.⁴²

Dalam resolusi khusus, konferensi Stockholm tersebut menetapkan tanggal 5 Juni sebagai "Hari Lingkungan Hidup Sedunia"

Diselenggarakannya konferensi Stockholm tersebut merupakan titik kulminasi perbincangan mengenai lingkungan hidup manusia dan memberikan gema keseluruh dunia termasuk ke Indonesia. Seirama dengan berkembangnya perhatian dan kesadaran tentang lingkungan hidup sejak diselenggarakannya konferensi Stockholm tersebut, hukum lingkungan nampak pula mengalami perkembangan yang pesat baik

⁴²)Ninieck Suparni, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Cetakan II, Jakarta, 1994, Hal. 22.

secara internasional maupun secara nasional di berbagai negara.

Pengaturan secara nasional sebagai langkah pertama, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (PAN) telah mengadakan Rapat Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pencegahan Pencemaran pada tahun 1971.

Di dalam rangka persiapan menghadapi konferensi PBB tersebut di atas Indonesia menyiapkan "Laporan Nasional" tentang keadaan lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam rangka penyusunan "Laporan Nasional" tersebut telah diselenggarakan seminar pengelolaan lingkungan hidup manusia dan pembangunan nasional di Bandung pada tanggal 15 - 18 Mei 1972.

Dalam seminar ini telah disampaikan makalah tentang "Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia : Beberapa Fikiran dan Saran" oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL, M. Makalah tersebut merupakan pengarah pertama mengenai perkembangan hukum lingkungan di Indonesia.⁴³

Adapun sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dibagi dalam 3 (tiga) zaman yaitu :

⁴³Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi kelima, Cetakan kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, Hal. 13.

1. Zaman Hindia Belanda

Yang pertama kali mengatur mengenai lingkungan hidup adalah mengenai perikanan mutiara dan perikanan bunga karang, yaitu *Parelvisscherij, Sponsenvisscherijordonnantie* (Stbl. 1916 No. 157), dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur Jenderal Idenburg pada tanggal 26 Mei 1920 dengan Penetapan Gubernur Jenderal No. 86, telah diterbitkan *Visscherijordonnantie* (Stbl. 1920 No. 396), yaitu peraturan perikanan untuk melindungi keadaan ikan.

Ordonansi lain di bidang perikanan adalah *Kustvisscherijordonnantie* (Stbl. 1927 No. 144), berlaku sejak tanggal 1 September 1927.

Ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan hidup adalah *Hinderordonnantie* (Stbl. 1926 No. 266), yang diubah / ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 No. 450, yaitu ordonansi gangguan. Ordonansi di bidang perlindungan satwa adalah *Dierenbeschermings Ordonnantie* (Stbl. 1931 No. 134), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1931 untuk seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia).

Di bidang perusahaan telah dikeluarkan yaitu *Bedrijfsreglementeringsordonnantie* 1934 (Stbl. 1938 No. 86 jo stb.

1948 No. 224).

Ordonansi yang penting di bidang perlindungan satwa adalah *Dierenbeschermingsordonnantie* (Stbl. 1931 No. 134), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1931 untuk seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia).

Berdekatan dengan ordonansi ini adalah peraturan tentang perburuan, yaitu *Jachtordonnantie* 1931 (Stbl. 1931 No. 133) dan *Jachtordonnantie Java en Madoera* 1940 (Stbl. 1940 No. 733) yang berlaku untuk Jawa dan Madura sejak 1 Juli 1940.

Ordonansi yang mengatur perlindungan alam adalah *Natuurbeschermingsordonnantie* 1941 (Stbl. 1941 No. 167).

Ordonansi ini mencabut ordonansi yang mengatur cagar-cagar alam dan suaka-suaka margasatwa, yaitu *Natuurmonumenten en Wildreservatenordonnantie* 1932 (stb. 1932 No. 17).

Dalam hubungan dengan pembentukan kota telah dikeluarkan *Stadsvormingsordonnantie* (Stbl. 1948 No. 168), disingkat SVO, yang mulai berlaku pada tanggal 23 juli 1948.

2. Zaman Jepang

Pada waktu zaman kependudukan Jepang, hampir tidak ada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang

dikeluarkan, kecuali Osamu S. Kanrei No. 6, yaitu mengenai larangan penebangan pohon aghata, alba dan balsem tanpa izin Gunseikan.

Peraturan perundang-undangan di waktu itu terutama ditujukan kepada memperkuat kedudukan penguasa Jepang.

3. Zaman Kemerdekaan

Uraian tentang peraturan perundangan-undangan yang diterbitkan sejak kemerdekaan diproklamasikan akan dikaitkan dengan penelaahan pasal-pasal UULH.⁴⁴

Berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesudah proklamasi kemerdekaan hanya mengatur satu segi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan tersebut bersifat parsial. Usaha penyusunan suatu konsep rancangan undang-undang yang mengatur masalah lingkungan hidup yang bersifat komprehensif integral dimulai pada tahun 1976, yaitu usaha yang untuk pertama kali dirintis oleh panitia perumus dan rencana kerja bagi pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup. Panitia ini dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 60

⁴⁴) Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi keenam, Cetakan kedua belas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, Hal. 82-85.

tahun 1972 dan bertugas menyusun, membuat inventarisasi dan rencana kerja bagi pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup.⁴⁵

Awal pembinaan lingkungan hidup dari segi yuridis di Indonesia secara konkrit tertuang dalam keputusan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup Nomor Kep. 006/MNPPLH/3/1979 tentang pembentukan kelompok kerja dalam bidang pembinaan hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup (disingkat Kelompok Kerja atau Pokja Hukum). Pokja hukum ini bertugas menyusun rancangan perundang-undangan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok tentang “Tata Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup”.⁴⁶

Konsep rancangan yang disusun pada waktu itu berjudul “Rancangan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pengembangan Lingkungan Hidup”. Usaha kearah penyusunan suatu rancangan undang-undang lingkungan hidup menjadi lebih intensif sejak Menteri Negara

⁴⁵Ninie Suparni, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Cetakan II, Jakarta, 1994, Hal. 53.

⁴⁶ Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kerjasama Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Disertasi Unair, Surabaya, 1987, Hal. 113.

Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup membentuk kelompok kerja pembinaan aparatur dalam pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup dalam bulan Maret 1979.

Tanggal 21 Maret 1981 Menteri Negara PPLH mengirimkan konsep RUU hasil pembahasan antar departemen untuk minta persetujuan para Menteri.

Berdasarkan saran para menteri, konsep RUU hasil pembahasan antar departemen diperbaharui dan disampaikan kepada Menteri / Sekretaris Negara pada tanggal 3 Juli 1981.

Pada tanggal 14 Nopember 1981, Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet mengirimkan naskah konsep RUU yang telah diperbaharui kepada beberapa menteri untuk penyempurnaan lebih lanjut. Hasil perbaikan akhir kemudian diajukan kepada Presiden Republik Indonesia.

Surat Presiden RI tertanggal 12 Januari 1982 RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup diajukan kepada pimpinan DPR untuk dibahas.

Setelah melalui pembahasan yang intensif, maka sidang paripurna terbuka DPR yang diadakan pada tanggal 25 Februari 1982 merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia khususnya dalam pengelolaan

lingkungan hidup, DPR menyetujui secara aklamasi RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup untuk disahkan menjadi undang-undang.

Pada tanggal 11 Maret 1982 RUU tersebut disahkan oleh Presiden RI menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Nomor 3215.

Setelah berjalan selama 15 tahun, karena mengingat keadaan kondisi serta situasi yang sudah semakin berubah dan berkembang maka Undang-Undang No. 4 tahun 1982 disempurnakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.2. KESADARAN HUKUM LINGKUNGAN.

Pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Dengan demikian, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan

dan mutu hidup rakyat tersebut, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang perlu adanya kesadaran hukum lingkungan.

Berbicara mengenai lingkungan hidup tentunya tidak lepas dari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun beberapa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama, mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu :

- a. menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
- b. menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistem sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
- c. mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga

terjamin kelestariannya.⁴⁷

Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia Ke-1 (1960-1970)” guna merumuskan strategi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)”.

Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan oleh wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk dijajagi kemudian guna menyelenggarakan suatu konperensi internasional mengenai lingkungan hidup manusia.

Dalam laporan Sekretaris Jendral PBB dinyatakan betapa mutlak perlunya dikembangkan “sikap dan tanggapan baru” terhadap lingkungan hidup. Maksud untuk menangani masalah-masalah lingkungan hidup itu adalah demi pertumbuhan ekonomi dan sosial, khususnya mengenai “perencanaan, pengelolaan dan pengawasannya”, laporan ini kemudian disahkan dengan Resolusi Sidang Umum PBB No.2581 pada tanggal 15 Desember 1969.

Dalam resolusi tersebut diputuskan untuk membentuk panitia persiapan yang bersama-sama sekjen PBB ditugaskan untuk menyiarkan tentang dan menarik perhatian umum terhadap mendesaknya kepentingan untuk menangani masalah-

⁴⁷⁾Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan, Edisi pertama, Cetakan ketiga, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, Hal. 2-3.

masalah lingkungan hidup.

Sidang Umum PBB menerima baik tawaran pemerintah Swedia untuk menyelenggarakan konperensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm pada bulan Juni 1972.⁴⁸

Kesadaran hukum lingkungan juga dipertegas dengan adanya Konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia "*United Nation Conference on the Human Environment*" diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972.

Diselenggarakannya konferensi Stockholm tersebut merupakan titik kulminasi perbincangan mengenai lingkungan hidup manusia, dan memberikan gema keseluruh dunia, dengan mensahkan hasil :

- (a) Deklarasi tentang lingkungan hidup manusia, terdiri atas : Preamble dan 26 asas yang lazim disebut *Stockholm Declaration*;
- (b) Rencana aksi lingkungan hidup manusia (*Action Plan*), terdiri dari 109 rekomendasi termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia;
- (c) Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan rencana aksi tersebut di atas terdiri dari:

⁴⁸)Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi kelima, Cetakan kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, Hal. 6.

- (i) Dewan pengurus (*Governing Council*) program lingkungan hidup (*UN Environment Program* = UNEP)
- (ii) Sekretariat, yang dikepalai oleh seorang Direktur Eksekutif;
- (iii) Dana lingkungan hidup;
- (iv) Badan Koordinasi Lingkungan Hidup.⁴⁹

Dengan adanya "*Stockholm Declaration*" ini, perkembangan hukum lingkungan memperoleh dorongan yang kuat sebagai awal dari kesadaran lingkungan hidup yang baik dan sehat serta serasi dan seimbang.

2.3. Penegakan Hukum Lingkungan

Hukum dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara jelas dan nyata, mengandung suatu aturan-aturan atau tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang tak lain berupa penegakan hukum.

Pengertian penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga undang-undang hukum yaitu administratif, perdata dan pidana. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum

⁴⁹Koesnadi Hardjasoemantri, *Op. Cit.*, Hal. 8.

yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman), secara administratif, keperdataan dan kepidanaan.⁵⁰

Menurut Daud Silalahi dalam bukunya *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup soal penataan dan penindakan (*"compliance and enforcement"*) yang meliputi program-program antara lain:

1. Penegakan sistem penegakan hukum.
2. Penentuan kasus-kasus prioritas yang perlu diselesaikan secara hukum.
3. Peningkatan kemampuan aparat penegakan hukum.
4. Peninjauan kembali undang-undang gangguan.⁵¹

Pengertian penegakan hukum lingkungan hidup juga dipertegas oleh Esmi Warassih, disebutkan bahwa dalam penegakan hukum (lingkungan) peraturan dapat berfungsi dengan memperhatikan 4 faktor yaitu : (1) peraturan itu sendiri, (2) petugas, (3) fasilitas, (4) warga masyarakat.⁵²

Penjelasan dari keempat faktor tersebut, yaitu :

⁵⁰Ninie Suparni, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Cetakan II, 1994, Hal. 160.

⁵¹Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1996, hal 184.

⁵²Esmi Warassih, Penegakan Hukum Dan Permasalahannya, Makalah, UMK, 1995, Hal. 5.

1. Peraturan itu sendiri, artinya undang-undangnya harus direncanakan dengan baik, yaitu kaidah-kaidah yang memasok tingkah-laku harus ditulis dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian.
2. Petugas yang menerapkan peraturan harus menunaikan tugasnya dengan baik dan mengumumkan secara luas.
3. Fasilitas yang ada diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan hukum.
4. Warga masyarakat yang menjadi sasaran peraturan tersebut dengan kata lain pemegang peran yang berlaku bagi efektivitasnya tergantung dengan tiga komponen yakni apakah normanya telah disampaikan, apakah normanya serasi dengan tujuan yang telah ditetapkan bagi posisi itu, dan apakah pemegang peran tergerakkan oleh motivasi yang menyimpang.

Oleh Satjipto Rahardjo dikatakan bahwa apabila membicarakan masalah penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka akan diperoleh gambaran "*stereotapes*" yang kosong. Ini baru berisi manakala dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.⁵³

⁵³)Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, Sinar Baru, tt, Hal. 26.

Sesuai dengan sifat dan efektifitasnya penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan preventif dan repressif.

Penegakan hukum yang bersifat preventif adalah upaya penegakan hukum lingkungan dengan mengikuti serta mematuhi apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan penegakan hukum yang sifatnya represif adalah dilakukan dengan memberikan sanksi pada perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan.

Hal tersebut di atas akan dapat berjalan dengan baik apabila aparat penegak hukum juga bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu mematuhi asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undang-Undang No. 14 tahun 1970 salah satunya ialah asas perlakuan yang sama atas setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.

Seperti tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan peraturan, serta wajib menjunjung hukum dan peraturan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hal tersebut adalah untuk menegakkan keadilan dalam kesamaan

kedudukannya pada setiap warga negara.⁵⁴

Dengan demikian dalam menegakkan hukum lingkungan, penegak hukum diwajibkan memperlakukan secara adil tanpa membedakan kedudukan, ras, agama, maupun status sosial setiap individu warga negara Indonesia.

Sejalan dengan penegakan hukum yang adil oleh M. Yahya Harahap disebutkan bahwa peraturan hukum yang diterapkan pada seseorang mesti diterapkan kepada orang lain dalam kasus yang sama tanpa membedakan pangkat, golongan, agama dan kedudukan.⁵⁵

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia dilaksanakan oleh penegak hukum yang tak lain adalah manusia, sebagai kategori manusia akan cenderung untuk memberikan penafsirannya sendiri-sendiri terhadap tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikannya, kepribadiannya dan faktor lain yang mempengaruhinya. Dalam praktek sering terjadi suatu kekurangan-kekurangan ataupun sering terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran yang terkadang dilakukan oleh aparat penegak

⁵⁴Iwan Gayo, Buku Pintar, Upaya Warga Negara, Cetakan XX, Jakarta, 1995, Hal. 18.

⁵⁵M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP, Jakarta, Pustaka Kartini, 1998, Hal. 2.

hukum itu sendiri. Akan tetapi tetap harus disadari bersama sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negeri ini, bahwa upaya penegakan hukum lingkungan mempunyai makna ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup yang berlaku yaitu suatu kondisi tercapainya dan terpeliharanya ketentuan hukum lingkungan yang baik yang secara umum maupun yang berlaku secara individual.

Penegak hukum di samping sebagai pemegang peran, penegak hukum juga merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

Penegakan hukum yang efektif tidak akan mungkin terlaksana tanpa bantuan warga masyarakat secara aktif, bantuan atau partisipasi warga masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam efektivikasi perundang-undangan. Secara psikologis, warga masyarakat khususnya penguasa berusaha untuk mematuhi hukum karena yang bersangkutan ingin memelihara hubungan baik dengan lingkungan maupun penguasa atau pemerintah.

Selanjutnya oleh Soerjono Soekanto, disebutkan untuk berhasilnya upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor netral, yakni :

1. Hukum (undang-undang) : setiap undang-undang adalah hukum, walaupun tanpa ada kata hukum.
2. Penegak hukum yakni pembentuk, pelaksana serta pengawas undang-undang.
3. Sarana/fasilitas pendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat sebagai pelaku hukum tanpa terkecuali.
5. Budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁶

Upaya penegakan hukum agar berhasil tentunya harus dilakukan secara bersama-sama baik individu maupun masyarakat serta aparat penegak hukumnya. Karena apabila dipahami bersama bahwa tugas hukum salah satunya adalah sebagai alat kontrol dan sarana stabilitas.

Oleh Abdurrahman dikatakan bahwa adanya fungsi hukum sebagai alat penertib (*ordering*), sebagai alat menjaga keseimbangan (*balancing*), dan sebagai alat katalisator (*pemermudah/penggampang*).⁵⁷

⁵⁶) Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan, Rajawali Press, 1983, Jakarta, Hal. 5.

⁵⁷) Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Indonesia, Alumni, Bandung, 1979, Hal. 22.

Pada kenyataannya di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran. Ini merupakan suatu gambaran lama bahwa masih ada beberapa individu yang belum taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditujukan untuk melindungi dan merawat serta mengelola lingkungan hidup agar pelestariannya tetap terjaga sehingga penegakan hukum lingkungan dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti apa yang menjadi harapan bangsa Indonesia agar tercipta lingkungan yang lestari dan sehat, khususnya lingkungan daerah industri Tamansari Yogyakarta. Untuk itu diharapkan agar semua pihak dapat melakukan upaya penegakan hukum lingkungan dengan sepenuhnya.

Dipertegas oleh Moh. Soerjani, Rafiq Ahmad, Rozy Munir, bila semua pihak dapat melakukan upaya penegakan hukum lingkungan maka setidaknya mereka telah melakukan tiga aktifitas yakni :

1. Mengendalikan lingkungan dan sarana sosial,
2. Mengawasi lingkungan dan proses interaksi positif,
3. Melaporkan keinstansi terkait dalam proses yang aktif.⁵⁸

⁵⁸Moh. Soerjani, Rafiq Ahmad, Rozy Munir, Lingkungan Sumber Daya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan, UI Press Jakarta, 1987, Hal. 59.

Ketiga kegiatan aktivitas tersebut bila dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan tentunya kondisi lingkungan dapat selalu terjaga dan terawasi dari bahaya pencemaran lingkungan hidup. Jadi di sini warga masyarakat diharapkan juga harus ikut aktif dalam mengawasi pelestarian lingkungan hidupnya, khususnya warga masyarakat yang tinggal di dekat daerah kawasan industri.

2.4. Hak Dan Kewajiban Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dan Hak Untuk Berperan Serta Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmatNya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta mahluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Bab III UUPLH menetapkan mengenai hak, kewajiban dan peran masyarakat untuk dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan lingkungan yang baik dan sehat tentunya juga akan meningkatkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis.

2.4.1. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Pasal 5 ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”

Sedang Pasal 5 ayat (2) menyatakan :

“Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup”

Pasal 5 ayat (3) menyatakan :

“Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Heinhard Steiger c.s. menyatakan, bahwa apa yang dinamakan hak-hak subyektif (*subyektif rights*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati.⁵⁹

Pasal 6 ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan

⁵⁹Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Cetakan kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, Hal. 128.

hidup”.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup”.

Demi pelestarian fungsi lingkungan hidup maka sebagai individu ataupun mahluk sosial dan khususnya pengusaha harus melakukan sesuatu yang terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan telah ditegaskan pada Pasal 6 ayat (1) UUPH bahwa setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup agar tidak terjadi suatu pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup tetap dijaga dengan baik karena di dalam lingkungan hidup itu terkandung kekayaan alam yang sangat besar dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pasal 7 ayat (1) berbunyi :

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup”.

2.4.2. Hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7 ayat (2) menyatakan :

Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara :

UPT-PUSTAK-UNDIP

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. Menumbuh ketanggap segera masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. Memberikan saran pendapat;
- e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Peran masyarakat sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik dari segi perencanaan maupun tahap pelaksanaan dan penilaian.

Dengan adanya peran serta tersebut anggota masyarakat mempunyai motivasi yang kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, guna mendayagunakan dan menghasilgunakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, perlu dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1. Pemimpin eksekutif yang terbuka.
- 2. Peraturan yang akomodatif.
- 3. Masyarakat yang sadar lingkungan.
- 4. Lembaga swadaya masyarakat yang tanggap.

5. Informasi yang tepat; dan
6. Keterpaduan.⁶⁰

Dengan melihat kenyataan di atas, peran serta masyarakat sangatlah penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena kunci keberhasilan program pembangunan di bidang lingkungan hidup ada di tangan manusia, yang dimaksud di sini adalah ada di tangan masyarakat.

⁶⁰Koesnadi Hadjasoemantri, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cetakan Keempat, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, Hal. 16.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Wilayah Dati II Kodya Yogyakarta.

Wilayah Dati II Kodya Yogyakarta secara geografis terletak di tengah-tengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai Wilayah Dati II Kotamadia Yogyakarta dibagi menjadi 14 wilayah Kecamatan, 45 Kelurahan dan 616 Rukun Warga serta 2.518 Rukun Tetangga, dengan jumlah penduduk 474.461 yang terdiri dari 244.484 orang laki-laki dan 299.977 orang wanita.

Luas lahan pertanian yang semakin lama semakin sempit, karena perubahan fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, pabrik-pabrik serta bangunan lainnya yang sesuai dengan perkembangan pembangunan wilayah Kotamadia Yogyakarta.

Batas Wilayah.

Kotamadia Yogyakarta terletak di tengah-tengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Dati II Sleman.
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Dati II Bantul dan Sleman
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Dati II Bantul.

- d. Sebelah Barat : Kabupaten Dati II Bantul dan Sleman.⁶¹

Secara garis besar Yogyakarta adalah daerah dataran rendah yang dibatasi oleh tiga aliran sungai yaitu :

- a. Sebelah Timur : Sungai Gajahwong.
- b. Sebelah Tengah : Sungai Code.
- c. Sebelah Barat : Sungai Winongo.

Letak daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian 114 meter dari air laut.

Adapun jarak dari Utara keselatan membentang sepanjang 7,5 km, jarak dari pantai Utara 121 km dan jarak dari pantai Selatan 27 km.

Curah hujan di daerah ini rata-rata 54 hari per tahun.

Secara rinci berdasarkan Buku Saku Kotamadia Yogyakarta yang diterbitkan oleh Kantor Statistik dan Pemda Kotamadia Yogyakarta tahun 1997 tentang kondisi umum wilayah tersebut tertera pada tabel berikut di bawah ini.

⁶¹)Tim Panjapapda, Company Profile, Kotamadia Dati II Yogyakarta, 1997/1998 hal iii.

Tabel 1: Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan dan Luas (km²) tahun 1997.

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	(%)
1.	Mantrijeron	2,61	8,03
2.	Kraton	1,40	4,31
3.	Mergangsan	2,31	7,11
4.	Umbul Harjo	8,12	24,98
5.	Kota Gede	3,07	9,45
6.	Gondokusuman	3,99	17,28
7.	Danurejan	1,10	3,38
8.	Pakualaman	0,63	1,94
9.	Gondomanan	1,12	3,45
10.	Ngampilar	0,82	2,52
11.	Wirobrajar	1,76	5,42
12.	Gedongtengen	0,96	2,95
13.	Jetis	1,70	5,23
14.	Tegalrejo	2,91	8,95
Jumlah		32,50	100,00

Sumber data Buku Saku, Yogyakarta Dalam Angka, Biro Pusat Statistik Kotamadia Yogyakarta, 1997, Hal. 3.

Dari 14 kecamatan di atas, salah satu yang dibicarakan dalam deskripsi ini adalah kecamatan Kraton yang terdiri dari 3 Kelurahan 43 RW dan 175 RT. Merupakan salah satu tempat bersejarah yang mempunyai hubungan dekat dengan Kraton, yang kini berkembang menjadi sentra industri kecil dan sekaligus menjadi obyek pariwisata yang terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri sejak tahun 1970, yaitu Tamansari dengan penduduknya yang mempunyai kegiatan yang khas, sebagai pengrajin batik tulis dan painting.

Tabel 2. Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan Menurut Kelurahan, Rw, Rt Tahun 1997.

No.	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1.	Mantrijeron	3	54	228
2.	Kraton	3	43	175
3.	Mergangsan	3	60	217
4.	Umbul Harjo	7	80	309
5.	Kota Gede	3	40	160
6.	Gondokusuman	5	64	276
7.	Danurejan	3	43	160
8.	Pakualaman	2	19	84

No.	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
9.	Gondomanan	2	31	111
10.	Ngampilar	2	21	121
11.	Wirobrajar	3	34	165
12.	Gedongtengen	2	47	165
13.	Jetis	3	36	169
14.	Tegalrejo	4	44	178
Jumlah		45	616	2.518

Sumber data Buku Saku, Yogyakarta Dalam Angka, Biro Pusat Statistik Kotamadia Yogyakarta, 1997, Hal. 5.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kantor Statistik pada akhir tahun 1997 yang terbesar terlihat pada kelurahan Umbulharjo yang terdiri dari 7 kelurahan dan memiliki 80 RW serta 309 RT, karena luas wilayahnya juga besar yaitu 8,12 km²

Tabel 3. Kepadatan Penduduk Kotamadia Dati II Yogyakarta Hasil Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980 dan 1990.

Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan Jawa / km²	Laki-laki	Wanita
1971	340.908	10.489	169.491	171.417
1980	398.192	12.252	199.755	198.437
1990	412.059	12.679	202.002	210.057

Sumber data Buku Saku, Yogyakarta Dalam Angka, Biro Pusat Statistik Kotamadia Yogyakarta, 1997, Hal. 6.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pada umumnya jumlah penduduk wanita lebih banyak daripada penduduk laki-laki.

**Tabel 4. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kodia Yogyakarta
Tahun 1993 - 1997.**

No.	Kecamatan	Tahun				
		1993	1994	1995	1996	1997
1.	Mantrijeron	13.991	14.197	14.309	14.380	14.464
2.	Kraton	21.621	21.666	21.820	21.887	21.984
3.	Mergangsan	16.135	16.363	16.608	16.885	17.126
4.	Umbul Harjo	6.734	6.940	7.117	7.264	7.405
5.	Kota Gede	7.695	7.882	8.071	8.255	8.436
6.	Gondokusuman	17.018	17.190	17.417	17.668	17.561
7.	Danurejan	26.202	26.344	26.515	26.632	26.801
8.	Pakualaman	22.170	22.375	22.551	22.652	22.710
9.	Gondomanan	18.285	18.264	18.210	18.317	18.221
10.	Ngampilar	26.705	26.900	26.904	27.178	27.479
11.	Wirobrajar	16.612	15.777	15.903	16.061	16.357
12.	Gedongtengen	27.639	27.519	15.109	26.724	26.831
13.	Jetis	21.239	21.406	21.350	21.508	21.689
14.	Tegalrejo	11.639	11.886	12.111	12.299	12.516

Sumber data Buku Saku, Yogyakarta Dalam Angka, Biro Pusat Statistik

Kotamadia Yogyakarta, 1997, Hal. 6.

Kepadatan penduduk tiap Kecamatan tersebut di atas, pada Kecamatan Ngampilan adalah yang terpadat, berikutnya : Gedongtengen, Danurejan dan sebagainya. Sedangkan kecamatan Umbulrejo paling sedikit jumlah penduduknya.

Tabel 5. Banyaknya Perusahaan Industri Besar/Sedang Kotamadia Dati II Yogyakarta Tahun 1993 - 1997.

Tahun	Besar	Sedang	Jumlah
1993	20	84	104
1994	20	88	108
1995	17	90	107
1996	18	117	135
1997	18	111	129

Sumber data Buku Saku, Yogyakarta Dalam Angka, Biro Pusat Statistik Kotamadia Yogyakarta, 1997, Hal. 9.

Industri Besar ialah Perusahaan Industri dengan tenaga kerja ≥ 100 orang.

Industri Sedang ialah Perusahaan Industri dengan tenaga kerja 20 - 99 orang.

Berkembangnya kompleks Tamansari sebagai tempat lokasi pariwisata yang diikuti dengan berkembangnya kerajinan dan industri kecil batik, seiring dengan

berkembangnya usaha koperasi di wilayah Yogyakarta. Sehingga sehingga perkembangan lembaga koperasi dan usahanya dalam tiga tahun terakhir menjadi 15 jenis koperasi dengan 403 lembaga usahanya dengan jumlah anggota mencapai 67.510 orang.

Tabel 6. Banyaknya Koperasi di Yogyakarta, Jenis Koperasi, Volume Usaha dan Jumlah Anggota tahun 1997.

Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi	Volume Usaha	Jumlah Anggota
1. KUD	1	3.337.834	1.409
2. Peternakan	5	11.478	241
3. Industri/Kerajinan	22	6.359.850	1.798
4. Simpan Pinjam	16	720.115	2.322
5. KPN/PKPN	99	8.743.725	28.207
6. ABRI	8	1.824.966	3.140
7. Wanita	17	710.419	2.435
8. Mahasiswa/Pemuda	12	46.912	1.125
9. Pensiunan ABRI/Sipil	17	617.072	2.203
10. Angkutan	7	4.732.069	704

Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi	Volume Usaha	Jumlah Anggota
11. Veteran	1	97.164	383
12. Karyawan Swasta	72	1.744.170	8.554
13. Karyawan BUMN	31	3.935.998	5.230
14. Serba Usaha	65	952.219	2.421
15. Pasar	6	2.709.792	6.129
16. Lain-lain	13	894.964	1.687
Jumlah Tahun 1997	397	37.438.747	67.990
Jumlah Tahun 1996	416	39.999.916	70.607
Jumlah Tahun 1995	403	49.420.367	67.510

Sumber data Buku Saku, Yogyakarta Dalam Angka, Biro Pusat Statistik Kotamadia Yogyakarta, 1997, Hal. 11.

Sejalan dengan berkembangnya usaha koperasi dalam aspek ekonomi, perdagangan dan industri di Yogyakarta, tergambar besarnya nilai ekspor dan impor di bawah ini, di mana ekspor lebih besar daripada impor dari tahun 1995-1997.

Perbandingan jumlah koperasi, volume usaha dan jumlah anggota pada tiga tahun berturut-turut (1995 - 1996 - 1997) dalam jumlah anggota yang relatif tetap dan jumlah koperasi yang menurun tetapi volume usaha makin lama makin meningkat dan maju.

Jumlah koperasi industri/kerajinan ada 22 buah dengan jumlah anggota 1.798 orang. Sedangkan koperasi serba usaha ada 65 buah dengan jumlah anggota 2.421 orang. Meskipun jumlah koperasi industri/kerajinan relatif masih kecil tetapi volume usahanya termasuk pada urutan kedua terbanyak di bawah koperasi KPN/PKPN di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 7. Nilai Export dan Impor Kotamadia Yogyakarta tahun 1994 - 1997 (US \$)

Tahun	Ekspor	Impor	Ekspor - 1
1994	32.355.449,18	318.203,41	32.037.245,77
1995	30.288.398,52	484.661,84	29.803.736,68
1996	31.463.393,38	678.155,12	30.785.238,26
1997	45.773.310,22	326.780,03	45.446.530,19

Sumber Data berdasarkan wawancara dengan Dra. Ida Farida, Kasbag Deperindag Kotamadia Dati II Yogyakarta, dan catatan yang ada di Departemen

Perindustrian Dan Perdagangan Kotamadia Dati II Yogyakarta. 23 September 1998.

Keterangan Ekspor - 1 adalah Ekspor 1 tahun sebelumnya.

Bidang Perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta nilai eksportnya lebih besar dari nilai impornya (surplus lebih besar) dari tahun 1994 sampai dengan 1997.

Gambaran umum tentang inflasi dijelaskan tentang laju inflasi di Dati II kodia Yogyakarta dan Pemda Jotamadia Yogyakarta (BPS) sebagai berikut.

Tabel 8. Data Jenis Usaha Pengguna Bahan Tekstil Kotamadia Yogyakarta Tahun 1997/1998.

Jenis Usaha	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Vol. Prod	Nilai Produksi (Rp.000)	Nilai BB+ Penolong (Rp.000)	Nilai Tambah (Rp.000)	Nilai Investasi (Rp.000)
1.Batik cap/ tulis	105	1.401	465.460	3.475.430	2.355.103	1.405.697	19.295.265
2.Batik lukis/ paint.	124	642	60.842	730.159	479.713	250.445	5.128.422
3.Konveksi/ garment	286	1.640	297.360	3.123.770	1.708.073	1.405.697	19.295.265
4.Bordir	91	290	46.745	666.525	299.935	366.590	4.892.550
5.Modiste	196	916	97.274	1.418.588	425.576	999.012	8.342.902
6.Kain perca/ patch work	5	86	27.300	819.000	368.530	450.470	70.200
Jumlah	807	4.975	997.981	10.233.472	5.636.930	4.586.541	42.660.116

Sumber Data berdasarkan wawancara dengan Dra. Ida Farida, Kasbag Deperindag Kotamadia Dati II Yogyakarta, dan catatan yang ada di Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Kotamadia Dati II Yogyakarta. 23 September 1998.

Tabel 8 adalah data jenis usaha andalan Kotamadia Yogyakarta yang juga merupakan target utama dari pembinaan yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Kotamadia Yogyakarta.

Dari keenam jenis usaha andalan tersebut di atas, 28 % merupakan jenis usaha batik, yang menyerap tenaga kerja 41 %, dan volume usahanya mencapai 53 %. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan industri batik di Kotamadia Yogyakarta.

Dengan nilai investasi yang hanya mencapai 24 % dari seluruh unit usaha tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar industri batik tersebut merupakan industri kecil, ataupun industri rumah tangga yang dikelola secara sederhana akan tetapi memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat Kotamadia Yogyakarta.

Tabel 9. Laju Inflasi Januari - Juli tahun 1998 di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1998.

Bulan	Laju Inflasi (%)	Kenaikan (%)
Januari 1998	6,93	0,17
Februari 1998	15,34	0,88
Maret 1998	7,54	0,53
April 1998	4,11	0,01
Mei 1998	3,57	3,57
Juni 1998	4,75	0,11
Juli 1998	8,60	0,95

Sumber Data berdasarkan wawancara dengan Dra. Ida Farida, Kasbag Deperindag Kotamadia Dati II Yogyakarta, dan catatan yang ada di Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Kotamadia Dati II Yogyakarta. 23 September 1998.

- a. Industri kecil adalah industri yang mempunyai tenaga kerja antara 5 - 19 orang.
- b. Industri rumah tangga adalah industri yang mempunyai tenaga kerja antara 1 - 4 orang.

- c. Perusahaan / usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seseorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Usaha Industri digolongkan menjadi empat yaitu :

- 1) Industri Besar, mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih.
- 2) Industri Sedang, mempunyai tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang.
- 3) Industri kecil mempunyai tenaga kerja antara 5-19 orang.
- 4) Industri rumah tangga, mempunyai tenaga kerja 1-4 orang.⁶²

3.2. Gambaran Umum Kondisi Wilayah Tamansari.

Tamansari yang termasuk dalam Kalurahan Pateban, Kecamatan Kraton, Kotamadya Yogyakarta mempunyai luas 12,666 hektar.

Dari luas 12,666 hektar Tamansari didiami 565 kepala keluarga (KK). Sedangkan jumlah penduduknya 2622 jiwa yang terdiri dari 1391 laki-laki dan 1231 wanita. Bangunan yang pada mulanya sedikit, sekarang ini menjadi semakin padat. Anak cucu penghuni pertama semakin bertambah sedangkan lahan tidak

⁶²Statistik Industri Besar Dan Sedang Propinsi DIY, BPS Kantor Statistik Prop. DIY, 1996 hal xii.

dapat bertambah. Otomatis bangunan di Tamansari menjadi semakin padat. Bahkan ada penduduk yang “ngliyer” atau memidahkan sebagian tanahnya kepada orang lain secara diam-diam. Hal ini sebenarnya tidak dibenarkan.

Tamansari walaupun padat tidak terlihat kumuh. Bangunan-bangunan kelihatan megah dengan dinding permanen dan lantai keramik. Apalagi bangunan milik pengusaha batik tulis. Bangunannya kelihatan mentereng. Hanya sebagian kecil saja rumah penduduk yang berdinding gedhek.

Kemegahan bangunan rumah penduduk tidak terlepas dari masa emas batik tulis. Pada masa emas ini kehidupan ekonomi masyarakat meningkat drastis.

Bangunan rumah secara permanen sebenarnya tidak boleh. Karena sesuai perjanjian mereka hanya menumpang tanah milik Kraton atau istilahnya “Magersari”. Dalam perjanjian dengan pihak Kraton mereka tidak boleh mendirikan bangunan secara permanen. Hal ini sebetulnya untuk mengantisipasi bila sewaktu-waktu Kraton membutuhkan mereka harus pindah tanpa memperoleh uang yang macam-macam.⁶³

Beberapa pelukis batik mulai merambah Tamansari, tatkala keluarga pelukis Djoened tinggal di Tamansari pada tahun 1933, diteruskan pembatik ulung Moh. Arif Koespartomo dari keluarga Haji Bilal bermukim tahun 1938.

⁶³) Wawancara dengan Ketua RW Tamansari Kecamatan Keraton - Bp. Maryanto, 25 September 1998.

Kerabat Honggoloekito asal Prenggan, Kotagede, yang berdarah Kalang, telah membawa sejumlah sentono di Tamansari. Namun yang jelas, kesaksian Mr Lod Effendi Aboeyamin yang asal kota Pati, sejak 1961 berdiam di lahan-lahan bisnis pariwisata Tamansari, seraya mengembangkan industri rumah tangga konveksi, penyewaan busana adat, rias manten dan kursus batik bagi turis asing.

Sedangkan keluarga jauh Tjokrosoeharto, seperti RM Hindarsin dan Oemarsono adalah perintis lukis populer (media kanvas) di awal 1952, dan tiga tahun kemudian mengembangkan senilukis batik kontemporer.

Barangkali mereka yang dari luar lingkungan bisnis karyaseni Tamansari jarang yang memahami, kenapa orang-orang ini sanggup “mewarnai” tata ruang Tamansari dengan nuansa artistik serta sentuhan estetik sebagaimana tampak sekarang.

Yang jelas, hadirnya turis asing yang belajar batik tulis hingga karawitan untuk tempo relatif lama, hal ini membuat nama Tamansari menjadi semakin menonjol.

Penduduk di Tamansari menyewa tanah cukup murah dari Kraton. Mereka hanya membayar 8 ribu rupiah tiap tahun.

Di Tamansari juga disinyalir ada penduduk yang memperoleh sertifikat hak milik.

Padahal ini amat sulit karena tanah tersebut tanah Kraton.⁶⁴

Dengan keberadaan pengrajin batik di Tamansari akan lebih membawa nama baik Indonesia di bidang seni di dalam maupun luar negeri.

3.3. Sejarah Tamansari Yogyakarta.

Hampir setiap orang yang datang ke Yogyakarta atau pernah tinggal, tentu tak asing lagi dengan nama Tamansari. Daerah yang tak terlalu luas, terkesan kumuh, penuh sesak hunian. Kawasan yang menjadi tontonan turis lantaran keberadaan istana air (Water Castle), dan pusat hunian para pengrajin batik yang kreatif.

Setelah Kerajaan Mataram dibagi dua, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta (Perjanjian Gianti, 1755). Pangeran Mangkubumi menuju Yogyakarta untuk mendirikan sebuah Kraton.

Dua tahun kemudian, Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi Raja Mataram dan bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I berkeinginan membangun sebuah taman, dengan maksud untuk beristirahat bersama keluarga, setelah beberapa tahun berperang melawan kompeni Belanda.

⁶⁴) Harian Bernas, Yogyakarta, 31 Agustus 1997.

Untuk maksud tersebut, Ngarso Dalem memerintahkan kepada Raden Rangga Prawirasentika mempersiapkan bangunan yang diperlukan. Dan atas kehendak Sultan, untuk pelaksanaan pembangunannya diserahkan kepada Raden Tumenggung Mangundipura, dan sebagai pemimpin proyek diserahkan KPH Natakusuma, putra sulung Sultan Hamengkubuwono I, yang kelak bergelar KGPAA Paku Alam I.

Pekerjaan pembangunan Tamansari dimulai pada 1758, dimulai dengan membangun pasarean Dalem (kamar tidur), kemudian sebuah lorong panjang menuju Kraton Yogyakarta. Lorong itu merupakan jalan rahasia, bila nantinya sultan secara diam-diam akan memerlukan istirahat ke Tamansari. Lorong tersebut dikenal dengan Gua Siluman. Pembangunan tersebut ditandai dengan candrasengkala, “Pujining Brahmana Ngobahake Payungutan” atau tahun Dal 1687 (1761 M).

Pembangunan kompleks Tamansari yang dikerjakan sekitar tujuh tahun itu, diakhiri dengan pembangunan sebuah pintu masuk (gapura) yang merupakan jalan utama masuk kompleks Tamansari. Dan keseluruhan pembangunan Tamansari selesai pada tahun 1765, dengan ditandai candrasengkala, “Lajering Kembang Sinesep Peksi” atau tahun Alip 1691 (1765 M).

Tamansari merupakan tempat peristirahatan atau rekreasi Sri Sultan bersama keluarga. Maka bagian-bagian di Tamansari hampir menyerupai yang ada di

lingkungan Kraton. Misalnya, kamar khusus Sultan ada sendiri, tempat bermain para kerabat beserta putra Dalem juga ada tersendiri, sampai tempat mandipun dibangun tersendiri. Untuk Sri Sultan diberi nama Umbulsari.

Keseluruhan ada 65 tempat di kompleks Tamansari. Di antaranya, Pulau Cemeti (Kenanga), Sumur Gumuling (bukan sumur seperti layaknya sumur tempat mengambil air, tetapi merupakan sebuah bangunan sumuran besar), di bagian atas bangunan sebuah rumah kecil, berbentuk bulat. Untuk menuju ketempat itu harus lewat sebuah terowongan. Bangunan rumah loteng kecil itu, konon, di samping tempat bersemadi juga tempat sholat Ngarso Dalem.

Bangunan penting lain, seperti Umbulmuncar, tempat pemandian khusus para kerabat dan garwa Dalem. Sebuah taman dengan pot-pot besar, terletak di sebelah timur pemandian. Beberapa tahun lalu, beberapa tempat telah mengalami pemugaran, termasuk pintu gerbang masuk (regol) menuju Tamansari.

Tamansari juga sering disebut Water Castle, karena seluruh kompleks bangunannya di kelilingi sebuah parit dalam. Dengan demikian pintu masuk utama ke Tamansari dibangun sebuah jembatan gantung, yang dapat diangkat ke atas dan diturunkan ke bawah. Jadi pada masa itu tidak sembarang orang bisa masuk ke Tamansari.

Bangunan Tamansari tidak asal dibuat. Pembangunannya memerlukan waktu yang amat lama. Sehingga tidak mengherankan jika bangunan Tamansari

kelihatan kokoh dan megah. Patung-patung dan relief banyak terdapat di bagian Tamansari.

Sekarang ini di antara bangunan-bangunan yang runtuh di Tamansari mulai bermunculan rumah-rumah penduduk. Pada awalnya daerah Tamansari diperuntukkan bagi abdi dalem Kraton dan kerabat Kraton.

Abad ke-19 hingga seabad kemudian, penuh sesaklah kawasan Tamansari sebagai “kampung tak resmi” di dalam kota Yogyakarta. Bahkan wartawan C Niewwenhuys pernah melaporkan, ketika jumenengan Sri Sultan Hamengkubuwono VII (1877-1921) dan Hamengkubuwono VIII (1921-1940), kampung Tamansari telah dihuni sekitar 750 orang. Jumlah itu sudah menjadi tiga kali lipat pada tahun 40-an.⁶⁵

3.4. Peraturan Tentang Hukum Lingkungan Bagi Industri Kecil Batik Tamansari Yogyakarta.

Industri kecil batik Tamansari Yogyakarta yang telah ada secara turun temurun dalam melaksanakan produksinya di bidang batik tentunya tidak lepas dari aturan-aturan yang harus ditaati, khususnya dalam hal pelestarian fungsi lingkungan hidup.

⁶⁵)Wawancara dengan Bp. R Wedono Laksito Damarto, Pamong Kraton Yogyakarta, 23 Mei 1998.

Berpijak dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, hal ini merupakan dasar hukum dari kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Maksud dari penjabaran sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu harus dapat menjamin secara operasional guna meningkatkan ketahanan nasional dan kehidupan serta penghidupan baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Pengelolaan lingkungan hidup tentunya harus mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan dengan mempertahankan pelestarian fungsi lingkungan terdapat dalam arah kebijaksanaan dan langkah-langkah disemua bidang pembangunan yang tertera dalam GBHN Tahun 1998.

Pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dituangkan dalam berbagai ketentuan peraturan-peraturan antara lain Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia didasarkan pada asas yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas berkelanjutan,

dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dengan mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah merupakan arahan kebijakan untuk menunjang terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi industri kecil batik Tamansari Yogyakarta antara lain adalah :

1. Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup.
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep. 12/Men.LH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pemantauan Lingkungan.
3. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 9 tahun 1997 tentang izin H.O.
5. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 037/KD/1988 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha.

Kelima peraturan tersebut di atas adalah merupakan aturan pokok yang harus ditaati oleh pengusaha batik Tamansari Yogyakarta dalam rangka menjalankan proses produksi batiknya.

Industri kecil batik Tamansari Yogyakarta apabila ditinjau dari keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep.12/Men.LH/3/1994, maka industri batik ini tidak termasuk wajib AMDAL, akan tetapi hanya wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan yang ditetapkan di dalam syarat perijinan yang berlaku.

Kewajiban melakukan UKL dan UPL pada industri kecil batik Tamansari adalah untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran lingkungan yang pada akhirnya bertujuan untuk menunjang pembangunan berwawasan lingkungan, karena proses industri batik juga menghasilkan limbah cair dan padat yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Oleh sebab itu peran pengusaha dalam melaksanakan kewajiban UKL dan UPL adalah untuk mengendalikan pembuangan limbah cair dan padat dari proses industri batik.

Menurut SK. Menperin No. 149/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Kewenangan Daerah Tingkat II dalam rangka penyerahan urusan di bidang usaha industri. Daerah tingkat II diberi kewenangan untuk menerbitkan berbagai perijinan industri tertentu dalam kelompok industri kecil yang wajib daftar maupun industri

kecil yang tidak wajib daftar.

Pada Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 256/MPP/7/Kep/1997 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri, disebutkan bahwa :

Pasal 3 Ayat (1) berbunyi : jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan memperoleh izin usaha industri.

Pasal 3 Ayat (2) berbunyi : jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis industri dalam kelompok industri kecil, dengan nilai investasi perusahaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 3 Ayat (3) berbunyi : terhadap jenis industri tertentu, sebagai mana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh tanda daftar industri yang diberlakukan sebagai izin usaha.

Pasal 4 ayat (1) berbunyi : terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh tanda daftar industri kecil kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (2) berbunyi : terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh tanda daftar industri.

Dengan melihat Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 256/MPP/7/Kep/1997, maka sebagian besar industri kecil batik Tamansari termasuk dalam golongan industri kecil yang dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin usaha industri, akan tetapi termasuk kelompok industri kecil yang wajib memperoleh tanda daftar industri, karena modal usahanya di atas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Hanya ada beberapa pengusaha yang asetnya tergolong di bawah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

3.5. Kegiatan Produksi Dan Pengolahan Limbah.

Industri batik dilihat dari dimensi ekonomi merupakan suatu bentuk organisasi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan dengan mempergunakan faktor-faktor produksi yang menghasilkan barang dan atau jasa untuk keperluan

hidup masyarakat.⁶⁶

Kegiatan Produksi batik Tamansari Kecamatan Kraton Yogyakarta yang telah berlangsung secara turun temurun ini, berdasarkan hasil pengamatan peneliti di wilayah Tamansari ini hanya memproduksi batik tulis dan batik painting.

Secara rinci dalam kegiatan produksi batik ini melibatkan komponen sebagai berikut :

1. Bahan-bahan produksi
2. Tenaga kerja
3. Proses produksi
4. Hasil produksi
5. Pengolahan Limbah produksi

3.5.1. Bahan-bahan Produksi.

Dalam penyediaan bahan-bahan produksi untuk produksi batik ini menurut pengamatan di lapangan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan baku, bahan pembantu dan ditunjang oleh peralatan produksi.

⁶⁶Wasis, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Cetakan kelima, Alumni, Bandung, 1992, Hal.4.

a. **Bahan Baku.**

Untuk bahan baku batik tulis maupun batik painting adalah sama yaitu menggunakan bahan baku, antara lain :

- 1) Kain : mori, sutera, prima, sanforist, santung.
- 2) Lilin : lilin halus, lilin biasa, lilin popokan.
- 3) Pewarna : remazol, naptol.

Untuk batik painting dalam hal pewarnaan lebih bervariasi (beragam), dibanding batik tulis yang lebih sederhana.

b. **Bahan Pembantu.**

Pada bahan pembantu dibutuhkan bahan-bahan antara lain : kustik soda, tepung kanji, bahan bakar (minyak dan kayu bakar), air.

c. **Peralatan Produksi.**

Peralatan yang sering digunakan untuk membatik antara lain adalah: Jodi, canting, popokan, wangkring, slerekan, ember.

3.5.2. Tenaga Kerja.

Usaha pengrajin batik Tamansari Yogyakarta tergolong industri kecil, karena dalam kondisi biasa (sehari-hari) mempunyai tenaga kerja yang berkisar antara 4 sampai 15 orang. Dan apabila sedang ada pesanan khusus dari dalam maupun luar negeri, untuk mengejar target pesanan

bisa memperkerjakan 25 sampai 50 orang tenaga kerja per hari.

Tenaga kerja batik di Tamansari Yogyakarta telah terorganisasi dengan baik, dengan dibentuknya Paguyuban Pengrajin Batik Tamansari yang diketahui oleh Bp. Mardiyono. Di mana para pekerja dapat menyalurkan aspirasinya maupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi melalui Ketua Paguyuban Pengrajin Batik.

Keberadaan para tenaga kerja sangatlah penting dalam penyelenggaraan proses produksi batik yang mengandung aspek seni, ketrampilan dan budaya khas Yogyakarta, apalagi bila tenaga kerja tersebut adalah tenaga kerja yang sudah terampil / ahli di bidang tersebut.

Para pekerja yang bekerja pada perusahaan atau industri kecil batik di Tamansari pada umumnya bekerja dengan jadwal kerja jam 08.00 sampai dengan jam 17.00, kecuali pada saat-saat tertentu khususnya pada saat banyak pesanan, mereka terkadang harus bekerja lembur sampai larut malam. Mengenai upah tenaga kerja per orang berkisar antara Rp.200 sampai dengan Rp.230 ribu rupiah per bulan tanpa lembur.⁶⁷

⁶⁷)Wawancara dengan Bp. Mardiyono, Ketua Paguyuban Batik Tamansari, tanggal 21 Agustus 1998.

5.3.3. Proses Produksi.

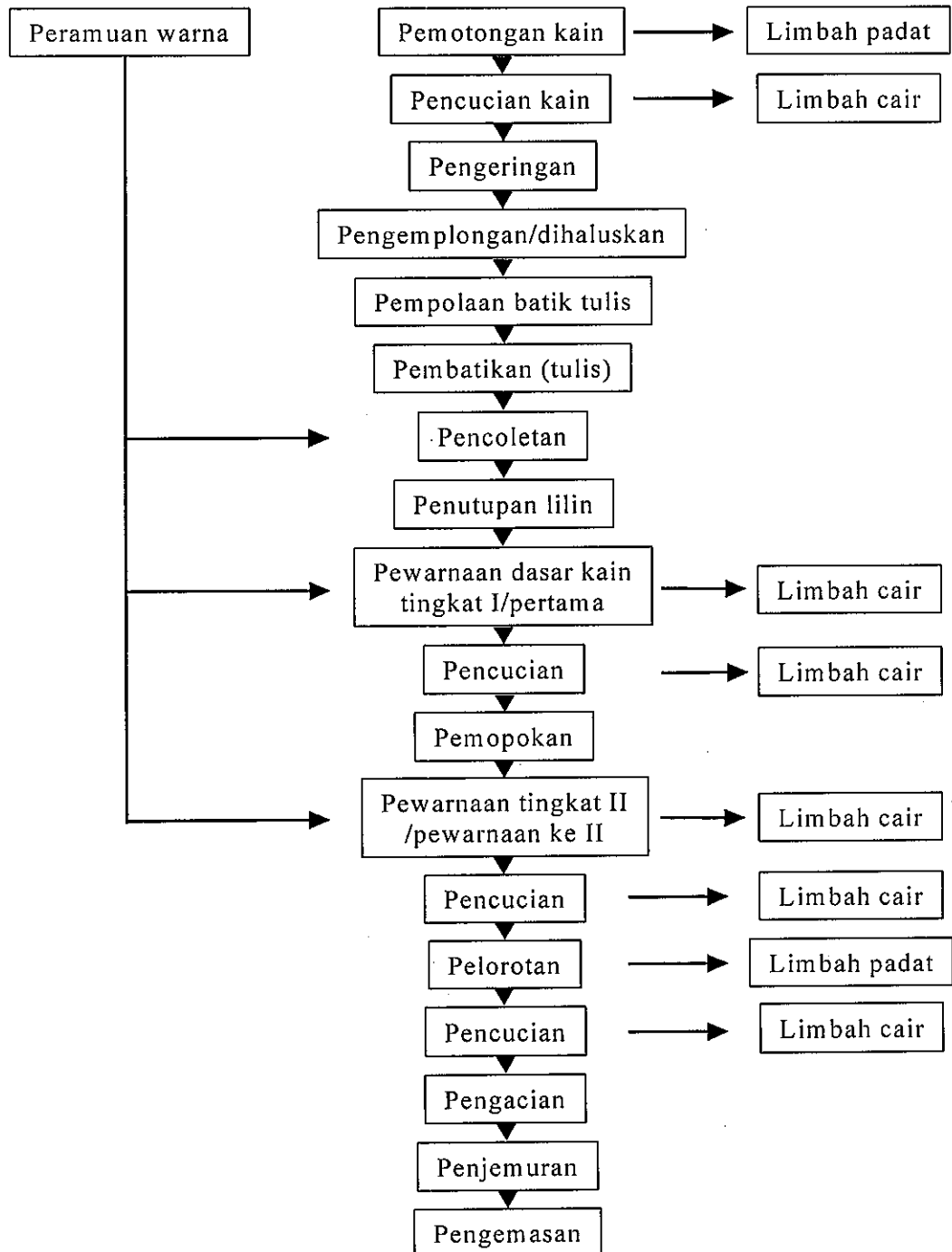
Setiap kegiatan manusia (proses produksi industri) dalam riak kecil dan riak yang lebih besar yang insidentil atau yang rutin selalu akan mempengaruhi lingkungan.⁶⁸

Demikian pula dengan proses produksi batik Tamansari Yogyakarta yang menurut pengamatan selama penelitian ternyata juga mempunyai potensi untuk menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak ditangani secara khusus.

Proses produksi Batik Tulis Tamansari Yogyakarta adalah sebagai mana tertera dalam proses bagan alir Proses Produksi Batik Tamansari Yogyakarta.

⁶⁸)NHT Siahaan, Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan, Cetakan pertama, Erlangga, Jakarta, 1987, Hal. 17.

Proses Produksi Batik Tulis Tamansari Yogyakarta.



Untuk proses produksi batik painting adalah sama dengan proses produksi batik tulis. Hanya pada proses pembatikannya lebih cepat karena corak batik painting bersifat kontemporer (bebas) sehingga tidak terpaku pada corak tradisional yang pada umumnya mempunyai pola-pola standard yang lebih rumit dan tidak banyak berubah dari jaman-kejaman. Di sini diperlukan ketrampilan seorang tenaga kerja yang mempunyai jiwa seni dan kreatifitas lebih tinggi daripada proses pembuatan batik tulis. Proses pembuatan batik painting juga memerlukan peralatan tambahan yaitu kuas, karena pada proses pembuatannya batik painting memerlukan bentuk coretan-coretan yang tidak bisa dibuat dengan canting.

Adapun penjelasan rinci proses produksi batik tulis adalah sebagai berikut:

1. Pencampuran warna. Jenis zat warna yang digunakan biasanya berwarna hitam, biru, kuning, violet dan merah. Pewarna ini berasal dari produk remazol dan naptol. Selain zat warna dalam pencampuran juga digunakan soda kaustik agar proses pewarnaan lebih sempurna.
2. Pemotongan kain. Tahap awal dalam proses produksi batik adalah pemotongan kain (mori, santung, prima, sanforist atau sutera). Pemotongan dilakukan karena pembelian bahan baku mori atau

bahan lainnya dalam bentuk gulungan (Pcs). Adapun bentuk pemotongan kain adalah sesuai dengan apa yang hendak dibuat (bentuk baju atau untuk perlengkapan rumah tangga). Dalam proses pemotongan kain terdapat sisa kain (kain perca) yang dapat dikategorikan sebagai limbah padat.

3. **Pencucian Kain.** Pencucian dilakukan dengan cara merendam kain (mori atau lain yang digunakan) dengan larutan caustic. Tujuan pencucian kain adalah untuk menghilangkan kanji yang menempel pada mori. Pada proses pencucian awal ini terdapat limbah cair yaitu berupa air bekas cucian (campuran air dengan caustic) yang langsung dibuang ke dalam bak penampungan limbah cair yang tersedia.
4. **Pengeringan.** Proses pengeringan merupakan proses lanjutan setelah proses pencucian. Umumnya pengeringan dilakukan secara alamiah, yaitu dengan bantuan sinar matahari.
5. **Pengemplongan.** Adalah proses yang dilakukan setelah pengeringan, yaitu menghaluskan kain dengan cara dipukul dengan kayu secara telaten dan berulang-ulang (dikemplong) agar kain menjadi lebih halus, sehingga mempermudah proses pempolaan.

6. **Pempolaan.** Pembuatan pola dilakukan secara manual di atas kain (mori). Biasanya proses ini dilakukan di atas meja atau bisa juga di lantai yang agak luas. Pola yang dibuat biasanya jenis motif tertentu sesuai dengan kehendak pemesan ataupun hasil kreasi sendiri.
7. **Pembatikan.** Adalah proses pembatikan dengan lilin kualitas halus sesuai dengan pola yang telah disiapkan.
8. **Pencoletan.** Setelah proses pembatikan, dilanjutkan dengan proses pemberian warna kombinasi sesuai dengan motif batik. Biasanya digunakan warna-warna cerah seperti merah, kuning, hijau dan biru.
9. **Penutupan lilin / pemopokan.** Proses ini dilakukan pada saat akan menambah kombinasi warna, agar warna yang sudah ada tidak tercampur. Penutupan lilin biasanya dilakukan oleh pembatik wanita dengan alat canting kecil untuk penutupan pada motif kecil dan cantik popokan/tonjok untuk penutupan motif-motif yang besar. Jenis lilin yang digunakan pada proses ini biasanya kualitas sedang (biasa). Apabila dikehendaki variasi warna putih maka bagian kain yang belum dicolet dapat ditutup dengan lilin.
10. **Pewarnaan tingkat I, tingkat II dan seterusnya.** Pada pewarnaan tingkat I biasanya bertujuan untuk pewarnaan dasar kain, yaitu mewarnai kain yang tidak ditutup dengan lilin. Pewarnaan kadang-

kadang dihentikan pada tingkat I saja, kemudian langsung dilanjutkan pada proses pencucian dan pelorotan. Apabila^a dikehendaki, pewarnaan dapat dilakukan beberapa tahap, setelah melalui proses pengeringan dan penutupan lilin lagi, tergantung kombinasi warna yang dikehendaki. Pada proses pewarnaan terdapat limbah yang berupa sisa pencampuran warna yang kemudian dibuang melalui bak penampungan limbah cair.

11. Pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan sisa zat warna yang menempel (tidak terserap oleh kain). Pencucian dilakukan dengan air dingin secara berulang-ulang sampai air cucuannya tidak pekat lagi. Pada proses ini juga terdapat limbah yang berupa air yang bercampur larutan pewarna yang luruh dari kain batik yang dicuci. Air limbah cucian ini juga dibuang melalui bak penampungan limbah cair.
12. Pelorotan. Pelorotan dilakukan dengan cara mencelupkan kain ke dalam air yang mendidih, dengan tujuan untuk menghilangkan sisa lilin. Pada proses pelarutan ini dihasilkan limbah berupa sisa lilin yang luruh bercampur air panas. Limbah ini kemudian disaring terlebih dahulu untuk menangkap sisa lilin yang terlarut ke dalam air, dan selanjutnya lilin tersebut masih bisa digunakan lagi. Sedang

airnya dibuang melalui bak penampungan limbah.

13. Pencucian. Pencucian pada tingkat ini dilakukan setelah proses pelorotan. Pada tahap ini kain dicuci dengan larutan caustic untuk menghilangkan sisa lilin yang masih melekat pada kain. Pada proses ini juga dihasilkan limbah cair berupa campuran antara larutan caustic dan air yang kemudian juga dibuang melalui bak penampungan limbah cair.
14. Pengacian. Pengacian dimaksudkan agar batik yang dihasilkan lebih rapih setelah kering. Proses ini dilakukan dengan cara membasahi kain dengan larutan kanji yang diencerkan. Sehingga proses ini juga menghasilkan limbah berupa sisa larutan kanji dan air, yang kemudian juga dibuang melalui bak penampungan limbah cair.
15. Pengeringan. Setelah diaci kemudian dikeringkan di bawah terik matahari sampai kain batik itu kering.
16. Pengemasan. Pengemasan merupakan proses akhir dari produksi batik. Proses ini tidak selalu dilakukan karena telah merupakan bagian dari kegiatan pemasaran sehingga tergantung dari keinginan konsumen. Ada yang langsung dikemas, ada pula yang dipigura dengan bentuk yang menawan sehingga lebih menarik bentuknya.

5.3.4. Hasil Produksi.

Seperti telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa setelah peneliti amati dan terjun di lapangan, ternyata di Tamansari Yogyakarta para pengusaha pengrajin batik hanya menghasilkan batik tulis dan batik painting. Hal tersebut bisa dimaklumi karena Tamansari adalah masih dalam lingkup Kraton, seperti yang dikemukakan oleh Bp. R Wedono Lukito Danarto Pamong dari Kraton Yogyakarta, bahwa para pengrajin batik Tamansari pada umumnya adalah keturunan ataupun kerabat dari para abdi dalem Kraton, yang dahulunya adalah para pengrajin batik tulis yang membuat batik khusus untuk keperluan Kraton. Hasil usahanya pun cukup baik kualitasnya dan cukup artistik dalam motif-motifnya.

Untuk batik tulis proses pembuatannya memakan waktu lebih lama bahkan harus didasari oleh kesabaran, ketekunan dan daya seni yang menunjang, sehingga tidak heran bila hasil produksinya relatif mahal dan pemasarannyapun dilakukan pada kalangan terbatas, yaitu pada orang yang benar-benar mengerti tentang perbedaan kualitas batik dan mampu di bidang ekonominya.

Hasil produksi rata-rata sebulan adalah 25 sampai dengan 30 buah dengan menggunakan tenaga kerja 8 orang. Sedangkan hasil produksi untuk batik painting adalah lebih banyak, yaitu rata-rata sebulan bisa

menghasilkan 100 buah batik painting yang siap dipasarkan.

Hasil produksi batik painting Tamansari banyak diminati oleh turis asing, bahkan sering dijual di luar negeri, seperti ke Perancis dan Belanda. Batik painting juga banyak dipesan oleh hotel-hotel di Jakarta dan kota-kota besar lainnya untuk pemanis ruangan dalam bentuk lukisan-lukisan maupun perlengkapan rumah tangga; seperti sprei, taplak meja, serbet makan dan sebagainya.⁶⁹

Hasil produksi batik ini telah membawa nama baik Indonesia di bidang karya seni di mata nasional maupun internasional.

5.3.5. Pengolahan Limbah Produksi.

Beberapa tahapan proses pembuatan batik Tamansari Yogyakarta ini menghasilkan limbah padat dan limbah cair.

a. Limbah Padat.

Pada limbah padat proses pembuatan batik adalah berupa potongan-potongan kain dan sisa-sisa lilin.

b. Limbah Cair.

Limbah cair berasal dari air proses pencucian yang mengandung

⁶⁹)Wawancara dengan Bp.R. Wedono Laksito Danarto, Pamong Kraton Yogyakarta, tanggal 1 Agustus 1998.

larutan caustic, bahan pewarna, kanji dan sisa lilin.

Limbah proses pembuatan batik tersebut di atas apabila dibuang sembarangan tentunya akan mengakibatkan timbulnya pencemaran terhadap lingkungan hidup di sekitar wilayah tersebut. Untuk menghindari terjadinya eksese-eksese yang tidak diinginkan tersebut, maka limbah padat dan cair dari proses pembuatan batik Tamansari kemudian diproses dengan cara sebagai berikut :

1) Limbah Padat.

Limbah padat pada proses pembuatan batik biasanya relatif kecil, dan limbah ini pada umumnya akan habis (tidak bersisa lagi) setelah dilakukan daur ulang ataupun dimanfaatkan untuk keperluan lain.

Misalnya, limbah padat berupa potongan kain, akan dimanfaatkan untuk dibuat kerajinan keperluan rumah tangga seperti : serbet, sarung bantal, maupun keset (alas kaki) serta kerajinan lainnya. Biasanya sudah ada orang yang menampung (membeli) sisa potongan kain dari para pengrajin batik ini, yang kemudian digunakan untuk keperluan seperti tersebut di atas.

Sedang limbah padat berupa lilin dari proses pelorotan kain,

akan digunakan lagi (didaur ulang) untuk proses pembuatan berikutnya. Hal ini juga dilakukan dengan tujuan penghematan bahan baku.

2) Limbah Cair.

Secara umum pengusaha sudah melakukan pengolahan limbah cair secara sederhana dengan membuat bak pengolahan limbah cair di tempat usahanya, agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya.

Ada dua macam proses pengolahan limbah cair yang dilakukan oleh para pengusaha batik Tamansari, yaitu pembuatan bak penampungan limbah kecil pada masing-masing tempat usahanya, dan pembuatan 6 buah bak pengolahan limbah besar yang digunakan untuk mengolah limbah cair.

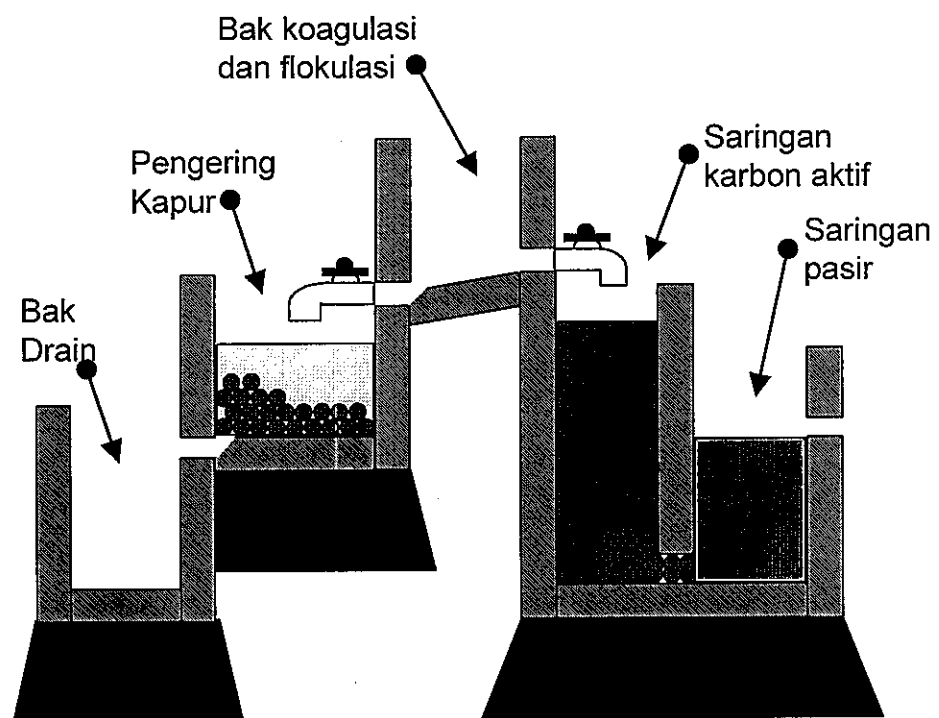
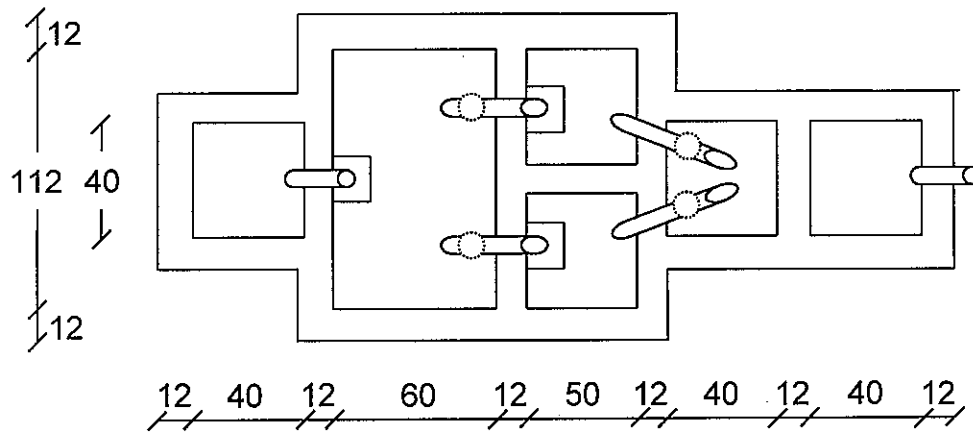
Secara bergiliran, air limbah produksi yang ditampung pada bak penampungan kecil dibawa kebak pengolahan limbah besar untuk diproses, dan kemudian baru dibuang keperairan umum.

Pembuatan bak pengolahan limbah besar tersebut didanai oleh pemerintah melalui Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Yogyakarta. Proses pengolahan limbah cair batik Tamansari

Yogyakarta adalah sebagaimana tertera dalam bagan alir Proses
Pengolahan Limbah Cair Batik Tamansari Yogyakarta.

Pengolahan Limbah Cair

Denah Tampak Atas



Penampang Memanjang

Proses Pengolahan Limbah Cair Batik Tamansari.

Fungsi masing-masing bak pengolahan limbah:

1. Bak Koagulasi/Flokulasi.
 - a. Penampungan limbah.
 - b. Tempat pengendapan lumpur.
2. Saringan Karbon Aktif.

Untuk mengurangi warna/kekeruhan limbah.
3. Saringan pasir.

Untuk mengurangi kadar suspensi limbah.
4. Penampung Lumpur.

Untuk menampung lumpur hasil pengendapan.
5. Bak Drain.

Untuk menampung air sisa pengatusan lumpur.
6. Sumur Peresapan.

Untuk meresapkan limbah hasil pengolahan.

Cara Kerja Pengolahan Limbah Cair Batik Tamansari.

1. Limbah cair batik, khususnya yang berasal dari proses pewarnaan/ pencelupan dan pencucian, ditampung pada salah satu bak Koagulasi/ Flokulasi sampai ketinggian ± 10 cm di

bawah permukaan atas dindingnya.

2. Masukan bahan-bahan penetral dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) Bubuk kapur sebanyak $\pm 15-30$ gram (tergantung PH awal), kemudian diaduk hingga merata.
 - 2) Masukkan larutan tawas 10% sebanyak 300-500 ml, kemudian diaduk selama 5-10 menit hingga timbul flok-flok.
 - 3) Diamkan minimal selama 1 jam. Apabila ada limbah baru datang, limbah baru tersebut ditampung pada bak Koagulasi/Flokulasi yang lainnya hingga mencapai ketinggian yang sama dengan no.1.
 - 4) Setelah waktu pengendapan cukup, turunkan ujung slang pipa outlet filtrat secara perlahan-lahan sehingga air bagian atas mengalir ke luar menuju bak saringan karbon aktif. Aliran ini akan berhenti bila filtratnya telah mengalir ke luar semua sehingga tinggal endapan lumpurnya.
 - 5) Endapan lumpur dialirkan ke penampungan lumpur dengan cara membuka kran kumpur yang ada.
 - 6) Jika bak koagulasi/flokulasi sudah selesai digunakan atau endapan lumpurnya sudah mengalir ke luar semua, maka

bak ini siap digunakan kembali dengan tata cara seperti awal.

- 7) Jika lumpur yang ada di bak penampungan lumpur sudah penuh, harus segera dibuang sebagai buangan padatan (sampah) yang sudah tidak berbahaya lagi bagi tumbuhan/binatang.

Cara pengambilan lumpur agar hati-hati agar tidak terambil pasirnya.

- 8) Air di bak drain secara periodik diambil dan diangkat keatas, untuk dicampurkan ke bak koagulasi/flokulasi untuk diolah kembali bersama dengan limbah baru.

3.6. Kesadaran Hukum Lingkungan Hidup.

3.6.1. Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Tamansari.

Awal berkembangnya kesadaran hukum pengusaha tentunya diawali oleh masalah-masalah yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup yang kurang tepat.

Masalah pengelolaan lingkungan hidup yang timbul karena keterbelakangan pembangunan adalah suatu masalah yang perlu segera diatasi. Dalam hubungan ini dapat dilihat; misalnya, bahwa akibat tekanan

kepadatan penduduk yang berkaitan erat dengan kemiskinan hidup telah mendorong penduduk di beberapa bagian, daerah tertentu; khususnya di pulau jawa untuk menggunakan kawasan hutan, yang sebenarnya harus dilindungi guna kegiatan pertanian. Hal ini telah mengakibatkan kerusakan dan kemudian diikuti oleh bahaya banjir yang datang berulang-kali. Di samping itu terdapat juga di pelbagai daerah di Indonesia kelompok penduduk yang hidup dari usaha pertanian yang berpindah-pindah, keadaan ini menimbulkan pula kerusakan hutan karena pembakaran dan berbagai tindakan lainnya. Ini merupakan kerugian yang sangat besar nilainya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup harus dapat tertangani secara benar dan serius.

Dalam pembangunan yang berkelanjutan ini juga dirasakan adanya masalah lingkungan hidup yang berhubungan dengan lahan pertanian, pengairan, gangguan kesehatan yang menimpa sebagian penduduk yang tempat tinggalnya dekat dengan daerah industri ataupun aliran sungainya tercemar oleh limbah sehingga ikan-ikan mati dan tidak bisa berkembang biak.

Kualitas lingkungan hidup akan meningkat bila didukung oleh adanya kesadaran hukum baik dari pengusaha maupun aparat pemerintah. Terbentuknya kesadaran hukum terkait erat dengan sistem yang berlaku di

masyarakat.⁷⁰

Kesadaran hukum pengusaha diperlukan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan seperti dijelaskan di atas, bahwa kesadaran hukum terkait erat dengan sistem yang berlaku di masyarakat. Unsur sistem yang mempengaruhi kesadaran hukum di masyarakat di antaranya adalah nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat tersebut.

Schubungan dengan berbagai masalah yang timbul tentang lingkungan hidup, perlu mendapat perhatian yang seksama dalam proses pembangunan yang berkelanjutan ini. Oleh karena itu masalah lingkungan hidup merupakan tantangan yang harus diatasi dan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Mengamati berbagai persoalan lingkungan hidup di Indonesia banyak yang disebabkan karena pencemaran yang diakibatkan oleh limbah industri. Seperti yang penulis soroti sekaligus melakukan pengamatan langsung di daerah Tamansari Yogyakarta dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh pengusaha batik sudah cukup baik dengan pembuatan bak-bak penampungan limbah yang dapat digunakan secara efektif dan selalu dipantau oleh petugas

⁷⁰Esmi Warassih, Endang Sri Santi, Mulyo Putro, Keefektifan Hukum Dalam Menanggulangi Pencemaran Air, Laporan Hasil Penelitian, Undip, Semarang, 1994, Hal. 45.

dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan secara berkala memberikan kegiatan melalui penyuluhan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang biasanya dilaksanakan setiap 6 bulan sekali dan juga dari beberapa dosen Universitas Gajah Mada yang melakukan penyuluhan tentang lingkungan hidup. (Hasil wawancara dengan Ketua Paguyuban Batik Tamansari Bapak Mardiyono).

Dalam kegiatan industri batik tersebut tentunya juga membawa dampak bagi lingkungan hidupnya, karena dalam pembuatan batik juga memakai zat pewarna yang juga dapat menimbulkan pencemaran, bila tidak ditanggulangi sebelumnya.

Sebagai warga negara yang taat akan hukum tentunya dapat memahami isi dari Pasal 6 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian setiap kegiatan manusia yang menyebabkan timbulnya pencemaran atau perusakan lingkungan

jelas akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu harus memberikan ganti rugi seperti tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Dengan demikian perlu kiranya ketaatan seseorang akan peraturan hukum yang telah ditetapkan.

Peraturan hukum banyak ditentukan oleh sikap, nilai dan perilakunya tentang hukum. Hal ini yang oleh Lawrence M. Friedman disebut dengan kultur hukum atau istilah yang sering dipakai adalah kesadaran hukum.⁷¹

⁷¹Esmi Warassih, Peranan Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Untuk Menanggulangi Pencemaran Lingkungan, Rajawali, Bogor, 1991, hal 275.

Berbicara mengenai masalah kesadaran hukum maka perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, adakalanya hal itu dikaitkan dengan perasaan seseorang terhadap hukum, misalnya : rasa keadilan dan kadang-kadang kesadaran hukum dikaitkan dengan perilaku seseorang, artinya kalau perilakunya menyimpang dari hukum maka tingkat kesadaran hukumnya rendah.

Sebenarnya masalah kesadaran hukum itu berkaitan dengan penilaian yang diberikan oleh manusia atau warga masyarakat. Jadi suatu kesadaran hukum ada, apabila terjadi penilaian terhadap hukum yang ada atau terhadap hukum yang diharapkan.⁷²

Pengertian kesadaran hukum juga dipertegas lagi oleh Soerjono Soekanto sendiri yang diartikan bahwa kesadaran hukum adalah suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan/atau hukum yang tidak baik. Jadi; kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat pada diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul.⁷³

⁷²)Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, CV Rajawali, Jakarta, 1980, Hal. 227.

⁷³)Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982, Hal. 211.

Jadi kesadaran hukum di sini adalah suatu keadaan di mana masyarakat, pengusaha dan/atau perorangan mempunyai pengetahuan, pemahaman terhadap isi peraturan, serta bersikap dan bertindak laku sesuai dengan peraturan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut maka terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan merupakan sarana untuk mencegah maupun untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran hukum, yang dimaksud di sini pelanggaran hukum lingkungan hidup.

Konsep dasar kesadaran hukum merupakan suatu konsep yang abstrak sehingga untuk melaksanakan penelitian kesadaran hukum dibedakan dengan berbagai indikator. Berdasarkan kerangka teori yang ada indikator kesadaran hukum meliputi:

1. Pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (law awareness).
2. Pemahaman akan isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance).
3. Sikap mereka terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude).
4. Perikelakuan hukum (legal behavior).

Sebagai acuan atau pedoman penilaian untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum pengusaha terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan keempat indikator yang ada tersebut dalam aplikasinya antara lain:

- A. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- B. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep.12/Men LH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- C. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- D. Peraturan Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 9 tahun 1977 tentang Ijin H.O.
- E. Keputusan Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 037/KD/1988 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tempat Usaha.

Secara keseluruhan kelima poin tersebut di atas merupakan peraturan hukum lingkungan yang dikenakan pada pengusaha industri kecil batik di Tamansari Yogyakarta.

Berdasarkan data yang peneliti ambil baik data sekunder maupun data primer di lapangan yang diperoleh melalui studi dokumen maupun wawancara langsung dengan responden serta observasi di komplek pengrajin batik Tamansari Kecamatan Kraton Yogyakarta selama 8 (delapan bulan), menunjukan hasil sebagai berikut :

Bahwa kesadaran hukum pengusaha batik di Tamansari Kecamatan Kraton Yogyakarta pada indikator pertama yaitu tentang pengetahuan akan peraturan hukum menunjukan hasil yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah sampel yang peneliti ambil sebanyak 14 pengusaha batik di wilayah Tamansari Kraton. Setelah peneliti melakukan pengamatan sekaligus wawancara, didapat hasil sebagai berikut, yaitu ada 11 pengusaha mempunyai tingkat pengetahuan akan peraturan hukum yang cukup baik, mengerti aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini khususnya adalah hukum tata lingkungan hidup yang harus ditaati oleh pengusaha dalam mengelola industri batiknya di wilayah Tamansari. Mereka juga memahami bila peraturan hukum lingkungan itu dilanggar tentunya akan dikenakan sanksi. Seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi, bahwa pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan. Sebagai contohnya, sebagian besar pengusaha (55 orang) sudah melakukan pemantauan lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan dengan membuat bak-bak kecil untuk penampungan limbah cair batik, walaupun sudah dibangun 6 bak besar penampungan limbah cair batik yang permanen, dibangun secara gotong royong oleh pengusaha batik dan dibantu sebagian

dananya oleh pemerintah dalam hal ini melalui Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, yang selalu memantau sekaligus mengawasi kualitas air buangan limbah batik.⁷⁴

Memahami tentang pengetahuan akan hukum, sebagai pengusaha batik dalam kegiatan usahanya tentunya juga terkait akan adanya izin usaha dan izin industri yang dikeluarkan oleh Bagian Perekonomian Setwilda tingkat II Yogyakarta. Dalam mengurus izin tersebut, salah satu syaratnya adalah harus memiliki izin H.O., akan tetapi pada kenyataannya hanya sebagian kecil saja dari para pengusaha batik di lingkungan Tamansari Kecamatan Kraton dengan jumlah pengusaha 64 orang, hanya ada 7 orang pengusaha saja yang memiliki izin H.O., kondisi ini peneliti tanyakan langsung kepada Bapak Drs. Djoko Setiono selaku Kasubag Perekonomian Setwilda Daerah Tingkat II Yogyakarta yang menangani khusus tentang pemberian izin H.O. Beliau menegaskan bahwa kondisi di Tamansari Kecamatan Kraton adalah memang merupakan daerah Magersari dan Cagar Budaya, di mana status tanahnya masih dimiliki oleh pihak Kraton Yogyakarta. Sehingga para pengusaha batik tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sampai saat ini Sri Sultan pun masih menegaskan bahwa sampai saat ini

⁷⁴⁾Wawancara dengan Bp. Mardiyanto, Ketua RW di Tamansari, tanggal 14 September 1998.

belum berniat untuk melepas aset Kraton termasuk tanah dan bangunan diwilayah Tamansari. Bangunan yang ada seharusnya seharusnya masih berbentuk semi permanen, walaupun pada kenyataannya karena kejayaan batik menjadikan bangunan sudah banyak berubah menjadi bangunan yang permanen.

Dengan melihat kondisi di atas, pihak Pemda dalam hal ini Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Yogyakarta memaklumi dan memahami para pengusaha batik di Tamansari Yogyakarta dalam melakukan usahanya tanpa memiliki izin H.O. karena tanah daerah Tamansari Kecamatan Kraton Yogyakarta adalah masih merupakan milik Kraton. Kondisi ini sudah berlangsung turun-temurun sejak berabad-abad yang lalu dengan tanpa memiliki izin H.O. tapi tetap berproduksi dengan baik, bahkan hasilnya pun banyak diekspor ke luar negeri.⁷⁵

Penegasan mengenai status tanah Tamansari juga dikemukakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X kepada wartawan Kedaulatan Rakyat usai membuka pameran Filateli di Hotel Melia Purosani pada tanggal 3 Oktober 1997, dikatakan bahwa sampai sekarang pihak Kraton tidak pernah mengizinkan tanah yang ditempati penduduk disertifikat, semua tanah di

⁷⁵) Hasil wawancara dengan Bp. Drs. Djoko Setiono, Kasubag Perekonomian Setwilda Tingkat II Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1998.

Tamansari masih milik Kraton dan semua yang menghuni areal yang akan dijadikan cagar budaya statusnya “magersari”. Dikatakan pula oleh Sri Sultan, “saya heran kenapa ada sertifikat tanah di Tamansari. Tanah itu kan milik Kraton, saya tidak mengerti apakah sertifikat itu sah atau tidak,” kata Sri Sultan.⁷⁶

Mengenai tingkat pendidikan para pengusaha batik di Tamansari, yaitu 40 orang lulus pendidikan SLTA dan 18 orang lulus pendidikan tingkat Akademi dan Sarjana serta 7 orang lulusan di bawah SLTA.

Mengkaji hal tersebut di atas bahwa tingkat pendidikan yang cukup cenderung membentuk pemahaman akan peraturan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam kaitan ini tingkat pendidikan yang cukup akan menjadi faktor pendorong dan memberi motivasi kepada pengusaha untuk selalu memperluas wawasan serta menambah ketrampilan di bidang usahanya.

Dijelaskan oleh Bapak Mardiyono Ketua Paguyuban Batik Tamansari Yogyakarta bahwa untuk mempertajam pengetahuan tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup maupun untuk meningkatkan ketrampilan para pengusaha, dari Dinas Perindustrian setiap enam bulan sekali mengadakan

⁷⁶Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 4 Oktober 1997.

penyuluhan-penyuluhan hukum maupun kursus-kursus serta latihan dalam rangka peningkatan bidang usaha batik agar para pengusaha lebih maju dan berkembang.⁷⁷

Indikator kedua yaitu tingkat pemahaman pengusaha terhadap isi peraturan perundang-undangan hukum lingkungan.

Di sini tingkat pemahaman terhadap isi ketetapan yang menunjang kewajiban pelestarian fungsi lingkungan hidup (Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997) dan peraturan dan peraturan lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup serta ijin usaha industri, dari mereka dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman pengusaha cukup baik, dari hasil wawancara dan pengamatan langsung bahwa para pengusaha telah sungguh-sungguh melaksanakan isi dari ketentuan-ketentuan hukum lingkungan yang dimaksud. Misalnya menjaga lingkungan tetap sehat dan bersih dari pencemaran air, khususnya dengan pembuatan bak-bak penampungan limbah cair maupun membuat tempat-tempat pembuangan limbah padat karena sebagian besar dari 56 pengusaha menyatakan mengerti tentang isi dari ketentuan hukum lingkungan yang harus dijalankan, di antaranya para pengusaha berusaha untuk mengurus ijin

⁷⁷⁾ Wawancara dengan Bp. Mardiyono, Ketua Paguyuban Batik Tamansari Yogyakarta, tanggal 23 Mei 1998.

H.O. (baru ada 8 pengusaha yang memiliki ijin H.O.), karena status tanahnya yang bukan hak milik (milik Kraton Yogyakarta), maka untuk memiliki ijin H.O., tanah tersebut harus dibeli dulu dari Kraton, padahal untuk modal usaha saja para pengusaha masih kekurangan modal.

Para pengusaha batik Tamansari juga mempraktekan hasil penyuluhan lapangan yang diberikan oleh petugas Balai Teknik Kesehatan Lingkungan tentang bagaimana memahami isi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sebagai contohnya tentang isi dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No:23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Untuk itu para pengusaha batik dalam membuang limbah cair batik sudah melakukan sesuai dengan aturan, yaitu pada bak-bak penampungan yang telah disediakan.⁷⁸

Dengan melihat data ini yang telah penulis amati selama berbulan-bulan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengusaha (48 orang pengusaha) cukup memahami isi dari peraturan-peraturan perundangan tentang hukum lingkungan hidup dan sampai saat ini tidak pernah ada keluhan yang berarti

⁷⁸⁾Wawancara dengan Bp. Drs. Sri Wahyudi, Kabag Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Yogyakarta, tanggal 21 Mei 1998.

dari masyarakat sekitar wilayah Tamansari terhadap adanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah cair batik.

Indikator ketiga yaitu sikap pengusaha terhadap peraturan-peraturan hukum. Untuk mengukur sikap para pengusaha terhadap peraturan-peraturan hukum, telah dirancang melalui wawancara khusus dengan para pengusaha yang berisi tentang bagaimana sikap pengusaha tentang isi ketentuan perundangan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Dari pengukuran sikap yang dilakukan diperoleh jawaban 58 orang pengusaha mendukung untuk bersikap mematuhi ketentuan maupun peraturan yang harus dijalankan oleh pengusaha terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hanya 7 orang pengusaha yang memberikan jawaban ragu-ragu atau kurang mendukung terhadap 5 (lima) ketentuan peraturan perundangan lingkungan hidup yang penulis ajukan untuk mengukur bagaimana sikap pengusaha terhadap peraturan lingkungan hidup yang berlaku.

Diceritakan oleh beberapa pengusaha melalui wawancara langsung dengan penulis, bahwa salah satu kekhususan dari para pengusaha batik Tamansari Yogyakarta adalah adanya pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan Kraton. Di mana masyarakatnya sejak dahulu kala, secara turun-

temurun sangat taat dan patuh sekali serta homat terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono. Hal tersebut timbul secara tulus dari hati nuraninya yang akhirnya sampai membudaya, termasuk di sini sikap pengusaha batik terhadap apa yang ada pada ketentuan perundang-undangan hukum lingkungan.

Perihal sikap patuh dari pengusaha batik Tamansari Yogyakarta kepada penguasa Kraton Yogyakarta ini memang sudah sudah berlangsung secara turun-temurun dari generasi ke generasi di berikutnya, sehingga perasaan atau sikap tersebut seolah-olah muncul secara alamiah (karena sudah mendarah daging).

Kebiasaan dari rasa patuh dan hormat terhadap keluarga Kraton ini pula yang membuat sikap para pengusaha batik taat dan patuh terhadap peraturan ataupun hukum yang berlaku (termasuk hukum lingkungan hidup). Ditambah lagi karena para pengusaha batik Tamansari ini tinggal di atas tanah milik Kraton Yogyakarta, sehingga ikatan batin antara para pengusaha batik dan Kraton menjadi semakin mendalam. Karena tanah dan bangunan tempat untuk melakukan usahanya berada di daerah Tamansari yang sebagian besar adalah milik Kraton, sehingga ada ikatan batin/moral yang lebih mendalam dari masyarakat Tamansari untuk mematuhi peraturan-peraturan yang dianjurkan oleh pihak Kraton, termasuk di dalamnya

peraturan tentang pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Kalaupun masih ada / terjadi pelanggaran pengolahan limbah, hal ini lebih banyak disebabkan karena keterbatasan dana ataupun ketidak mampuan modal dari para pengusaha untuk membuat sarana pengolahan limbah yang lebih baik.⁷⁹

Pihak Kraton dan Pemda juga ikut andil dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup di Tamansari, karena pihak Kraton dan Pemda (dalam hal ini Departemen Kesehatan) melalui Balai Teknik Kesehatan Lingkungan ikut mendorong, mengawasi dan memberikan teladan kepada para pengusaha untuk mematuhi peraturan lingkungan hidup dengan membuat bak-bak pengolahan / pencelupan batik, pemeliharaan sungai, pembuatan saluran-saluran pembuangan limbah cair secara gotong-royong dengan maksud agar limbah industri batik tidak mencemari daerah / lingkungan sekitarnya.

Di sini Balai Teknik Kesehatan Lingkungan adalah laboratorium pelayanan di bidang kesehatan lingkungan yang fungsi dan tugasnya di antaranya adalah melaksanakan pemeriksaan kesehatan lingkungan limbah cair batik apakah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan baku mutu yang telah ditetapkan.

⁷⁹⁾Wawancara dengan Bp. R. Wedono Laksito Danarto, Pamong Kraton Yogyakarta, tanggal 5 Juni 1998.

Selain itu Balai Teknik Kesehatan Lingkungan juga bertugas memberikan saran dalam rangka penanganan masalah lingkungan hidup.⁸⁰

Dengan melihat kenyataan di atas, pengusaha batik bersikap mendukung terhadap berbagai isi yang terdapat dalam ketentuan dan peraturan hukum lingkungan, dengan sangat patuhnya menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat.

Indikator yang keempat adalah pola perilaku hukum. Yang dimaksud dengan pola perilaku hukum di sini adalah perilaku pengusaha yang sesuai dengan peraturan hukum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No:23 tahun 1997, Kepmen No:12/Men.LH/3/1994, Peraturan Pemerintah No:20 tahun 1990, Peraturan Pemerintah Kotamadia Yogyakarta N0:037/KD/1998.

Perilaku hukum tersebut berupa ketaatan pengusaha terhadap pelestarian fungsi lingkungan, perijinan, pengolahan limbah industri batik tersebut merupakan parameter yang peneliti ajukan untuk mengetahui perilaku hukum pengusaha batik tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum atau kurang sesuai dengan ketentuan hukum sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dari hasil wawancara langsung didapatkan 11 orang menyatakan ragu-

⁸⁰⁾ Wawancara dengan Bp. Drs. Sri Wahyudi, Kabag Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, tanggal 7 Nopember 1998.

ragu atau kurang mentaati dan 54 orang pengusaha telah memenuhi perilaku hukum yang baik (sesuai) telah melakukan kewajibannya dengan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas hanya keterbatasan di bidang perijinan H.O. saja yang menjadi kendala, akan tetapi hal ini masih dimaklumi oleh pihak pemda, dalam hal ini bagian perekonomian, karena tanah yang ditempati adalah milik Kraton. Hal lain yang masih berkaitan dengan izin usaha, bahwa mengapa setiap usaha harus memiliki izin tempat usaha (H.O.) Sebab :

- Izin tempat usaha atau izin undang-undang gangguan sebagaimana diatur dalam Hinder Ordonantie Staatsblad 1926 ditambah terakhir dengan staatsblat 1940 No.14 dan No.450 mewajibkan semua perusahaan untuk memiliki izin tempat usaha (H.O.)
- Hal ini disebabkan hampir semua kegiatan usaha betapapun kecilnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya.
- Permohonan izin oleh pengusaha juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.⁸¹

Pada umumnya pengusaha batik di wilayah Tamansari adalah tergolong

⁸¹⁾Menik S Bandiah, SH, Prosedur Permohonan Izin Usaha, Setwilda Daerah Tingkat II Yogyakarta, 1996, Hal. 2.

industri kecil dengan modal yang minim pula sehingga pada tahap awal para pengusaha masih mengutamakan kelangsungan usahanya dan belum memikirkan aspek lain termasuk keinginan beli tanah dari pihak Kraton agar dapat memiliki ijin H.O. sendiri. Walaupun tanpa memiliki ijin H.O. tapi tetap dapat berproduksi tanpa hambatan, karena hal ini secara tidak langsung telah mendapat persetujuan dari Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Yogyakarta, karena terhalang akan status tanah yang ditempati. Meskipun demikian peraturan lain (selain izin H.O.) telah dipenuhi dengan baik termasuk pengelolaan limbah dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian perilaku hukum yang dilakukan oleh pengusaha batik Tamansari Yogyakarta dapat dikatakan sesuai dengan peraturan hukum lingkungan hidup dan ijin industri.

3.5.2. Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan tak dapat berjalan sendiri tanpa ada motor penggerakannya, yakni niat dan kesadaran dari dalam hati manusia itu sendiri untuk berbuat sesuatu yang baik dan bermanfaat terhadap lingkungan hidupnya. Kondisi Indonesia yang sedang membangun ini tentunya sangat ditunjang oleh lingkungan hidup yang baik, dalam arti

lingkungan hidup yang tidak rusak maupun tidak tercemar, demi suksesnya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk menuju terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Dijelaskan oleh I Supadi adanya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni :

- a. Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan.
- b. Memperbaiki kualitas hidup manusia.
- c. Melestarikan daya hidup dan keragaman bumi.
- d. Menghindari sumber-sumber daya yang tidak terbarukan.
- e. Berupaya tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi.
- f. Mengubah sikap dan gaya hidup yang cenderung boros.
- g. Mendukung kreatifitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri.
- h. Menyediakan kerangka kerja nasional untuk memadukan upaya pembangunan dan pelestarian fungsi lingkungan.
- I. Menciptakan kerjasama global.⁸²

Melihat prinsip pembangunan yang berkelanjutan ini dalam kenyataannya tak dapat dilepaskan dari sumber daya alam yang

⁸²I Supardi, Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya, Alumni, Bandung Cetakan I, 1994, Hal. 112.

terpelihara baik untuk kesejahteraan rakyat. Termasuk di daerah Tamansari Yogyakarta yang merupakan daerah yang berpotensi untuk pengembangan industri batik pada umumnya.

Pemeliharaan lingkungan hidup dari bahaya pencemaran limbah cair batik telah disadari oleh pengusaha batik dengan mematuhi aturan-aturan hukum yang tertulis maupun aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak Kraton Yogyakarta secara tertulis maupun tidak tertulis.⁸³

Dengan telah melihat secara langsung di lapangan dan wawancara dengan beberapa pengusaha batik yang ada di Tamansari Yogyakarta, ada beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, di antaranya adalah :

1. Budaya dan sikap patuh pengusaha.
2. Tingkat pendidikan yang relatif cukup.
3. Status tanah milik Kraton.
4. Sikap penguasa Kraton yang mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Usaha pemerintah dalam mewujudkan pelestarian fungsi

⁸³) Wawancara dengan Bp. Supardi, Pengusaha batik Tamansari Yogyakarta, tanggal 8 Juli 1998.

lingkungan hidup.

Faktor-faktor pendorong tersebut di atas dapat diperinci sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Yang Cukup.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan semakin memperluas wawasan berpikir, mudah menerima dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti telah diketahui sebelumnya bahwa tingkat pendidikan para pengusaha batik Tamansari terdiri atas 40 orang lulus pendidikan SLTA dan 18 orang lulus pendidikan tingkat Akademi dan Sarjana serta 7 orang lulusan di bawah SLTA. Dengan bekal tingkat pendidikan yang cukup tersebut maka para pengusaha batik Tamansari dengan cepat bisa memahami pentingnya melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mau melaksanakannya dengan penuh kesadaran.

2. Budaya dan sikap patuh.

Adat kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun-temurun selama berabad-abad merupakan faktor pendorong yang kuat, karena adat kebiasaan itu secara otomatis telah membentuk pola pikir dan sikap seseorang sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, sehingga akhirnya terbentuk suatu pola / sikap yang demikian kuat, membudaya, mendalam dan bahkan sampai membentuk sifat

fanatisme yang terkadang sulit dipahami oleh orang lain.

Demikian pula tentang sikap patuhnya para pengusaha Tamansari kepada penguasa Kraton Yogyakarta, sehingga apapun yang diperintahkan ataupun dilarang oleh penguasa Kraton akan dipatuhi dan dilaksanakan secara tulus ikhlas, termasuk masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

3. Status Tanah Milik Kraton.

Status tanah daerah Tamansari yang sebagian besar adalah milik Kraton juga merupakan faktor pendorong yang kuat. Karena sebagian besar para pengusaha batik Tamansari tinggal dan menjalankan usahanya di atas tanah milik Kraton, maka ada ikatan moral, rasa ketergantungan dan tanggung jawab yang kuat dari para pengusaha untuk mematuhi persyaratan ataupun peraturan yang ditetapkan oleh pemilik tanah, yang antara lain adalah mewajibkan agar para pengusaha batik tidak boleh merusak lingkungan hidup, tetapi justru harus menjaga agar pelestarian fungsi lingkungan hidup tetap terpelihara dengan baik.

4. Sikap Penguasa Kraton Yang Mendukung Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Sikap penguasa Kraton yang mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup, merupakan faktor pendorong yang paling kuat, yang menjadikan para pengusaha batik Tamansari mau melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Karena para penguasa Kraton adalah merupakan panutan dari para pengusaha dan sekaligus juga pemilik tanah dari sebagian besar daerah Tamansari, sehingga sikap dan kebijakan yang ditetapkan oleh para penguasa Kraton akan dianggap sebagai aturan ataupun undang-undang, yang terkadang lebih dipatuhi oleh para pengusaha Tamansari daripada undang-undang ataupun peraturan yang resmi ditetapkan oleh pemerintah.

Mengenai pelestarian fungsi lingkungan hidup, pihak penguasa Kraton secara tegas telah mengeluarkan peraturan bahwa kepada masyarakat yang menempati ataupun menggunakan tanah milik Kraton, harus menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak membuang limbah yang bisa mengakibatkan timbulnya pencemaran di sekitar wilayah tanah milik Kraton.

5. Usaha Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Ilmiah Dalam Mewujudkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Usaha pemerintah dan partisipasi masyarakat ilmiah dalam mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup juga merupakan faktor pendorong yang penting, karena betapapun kuatnya niat para pengusaha batik Tamansari untuk mewujudkan terpeliharanya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengusahakan tidak membuang limbah yang bisa menyebabkan pencemaran, akan tetapi apabila para pengusaha tidak memiliki kemampuan ataupun pengetahuan tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengolahan limbah, maka tetap akan sia-sia belaka.

Untuk itu usaha pemerintah yang berupa penyuluhan tentang pengetahuan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan teknis pengolahan limbah, bantuan / subsidi membuat bak pengolahan limbah cair yang benar-benar sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang berjudul “Kesadaran Hukum Pengusaha Dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup” yang telah peneliti paparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan.

1. Secara umum pengusaha industri kecil batik Tamansari Yogyakarta memiliki tingkat pengetahuan hukum lingkungan yang cukup baik, karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pengusaha yang sudah cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pendidikan pengusaha yang sebagian besar adalah SLTA sampai dengan perguruan tinggi. Penegakan hukum lingkungan hidup telah dilakukan oleh pengusaha batik Tamansari.
2. Pengusaha batik Tamansari dalam memahami hukum, terutama tentang isi peraturan hukum sudah cukup baik, sehingga para pengusaha mau menaati peraturan perundang-undangan hukum lingkungan hidup yang ada. Hal tersebut menyebabkan tingginya tingkat kesadaran hukum dari para pengusaha batik Tamansari.

3. Sikap dan perilaku pengusaha batik Tamansari Yogyakarta terhadap kesadaran hukum cenderung tinggi karena dipengaruhi oleh adat kebiasaan yang sudah berjalan secara turun-temurun, yaitu patuh dan taat kepada penguasa Kraton, termasuk semua aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dikeluarkan oleh Kraton.

Kebiasaan patuh kepada aturan-aturan Kraton ini yang memotivasi para pengusaha batik untuk mematuhi pula ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan usaha industri batik.

4. Ada beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu tingkat pendidikan, budaya dan sikap patuh, kondisi status tanah milik kraton, sikap penguasa kraton yang mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup dan usaha pemerintah yang mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Di antara kelima faktor tersebut yang menjadi pendorong utama adalah budaya dan sikap patuh pengusaha terhadap penguasa kraton.

Adat kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun-temurun selama berabad-abad merupakan faktor pendorong yang kuat, karena adat kebiasaan itu secara otomatis telah membentuk pola pikir dan sikap seseorang sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, sehingga akhirnya terbentuk suatu pola / sikap yang demikian kuat, membudaya, mendalam dan bahkan sampai

membentuk sifat fanatisme yang terkadang sulit dipahami oleh orang lain. Sikap patuhnya para pengusaha Tamansari kepada penguasa Kraton Yogyakarta, sehingga apapun yang diperintahkan ataupun dilarang oleh penguasa Kraton akan dipatuhi dan dilaksanakan secara tulus ikhlas, termasuk masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

UPT-PUSTAK-UNDEF

4.2. Saran.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan selama penelitian, maka disarankan sebagai berikut :

1. Dalam menangani masalah lingkungan hidup diperlukan penanganan yang lebih intensif agar tidak terjadi permasalahan, dengan menggunakan prinsip “lebih baik melakukan pencegahan daripada memperbaiki lingkungan yang sudah terlanjur rusak”.
2. Agar lebih mengoptimalkan faktor-faktor pendorong dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup, misalnya : pihak kraton sebagai pendorong utama dalam mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup, karena selama ini mereka menganggap penguasa kraton sebagai panutan yang demikian dihormati dan ditaati, di samping adanya ketergantungan dari status tanah yang ditempati oleh para pengusaha batik Tamansari adalah milik kraton. Model pendekatan dengan cara di atas juga akan bisa dikembangkan di daerah lain, misalnya : daerah industri batik pekalongan di mana masyarakatnya sangat menghormati para ulama, atau di daerah luar Jawa di mana masyarakatnya masih sangat mengagungkan seorang kepala suku. Dengan lebih mengoptimalkan faktor-faktor pendorong yang khas dari masing-masing daerah, diharapkan usaha dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup akan lebih berhasil.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1979. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Aminah. 1997. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pengusaha Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Kodya Pekalongan*. Jakarta.
- Bandiah, Menik S. 1996. *Prosedur Permohonan Izin Usaha*. Yogyakarta : Setwilda Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Buku Saku. Yogyakarta Dalam Angka*. 1997. Yogyakarta : Biro Pusat Statistik Kotamadia Yogyakarta.
- Danusaputro, St. Munadjat. 1985. *Hukum Lingkungan*. Buku I : Umum. Cetakan II. Bandung : Bina Cipta.
- Dirdjosiswoyo, Soedjono. 1983. *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*. Cetakan II. Bandung : Alumni.
- Effendi, S. Januari 1991. *Sistem Administrasi Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Prisma No.1. Jakarta : LP3ES.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kulitatif Dasar-dasar Dan Aplikasi*. Malang : Yayasan Asih Asah Asuh.
- Gayo, Iwan. 1995. *Buku Pintar, Upaya Warga Negara*, Cetakan XX, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. 1994. *Metodologi Research*. Jilid dua. Yogyakarta : Andi Offset.
- Hadiati Koeswadji, Hermien. 1993. *Hukum Pidana Lingkungan*. Cetakan I, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 1998. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1993. *Hukum Tata Lingkungan. Edisi kelima*. Cetakan kesepuluh. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

- , 1995. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Edisi Keempat. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- , 1995. *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Edisi Pertama. Cetakan ketiga. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Harkisnowo, Harkristuti. 14-29 Nopember 1994. *Metodologi Penelitian Dalam Kriminologi : Berbagai Alternatif*. Makalah yang disampaikan dalam penataran Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung : FH Undip.
- Husein, Harun M. 1995. *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*. Cetakan II. Jakarta : Bumi Aksara.
- J. Moleong, Lexy. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Jayadinata, Johara T. 1978. *Tata Guna Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Cetakan I. Bandung : ITB.
- Lili Rasjidi, IB Wiyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetaka ke-II, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Moh. Soerjani, Rafiq Ahmad, Rozy Munir. 1987. *Lingkungan Sumber Daya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Jakarta : UI Press.
- Purnadi Purbocaroko, Soerjono Soekanto. 1986. *Perihal Kaedah Hukum*. Cetakan I. Bandung : Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 1994. *Tinjauan Sosiologis Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan ICEL. Tahun ke 1 No.1.
- , 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- , TT. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : Sinar Baru.
- Salim, Emil. 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Cetakan VI, Jakarta : LP3ES.

- Sastrawijaya, Tresna. 1991. *Pencemaran Lingkungan Hidup*. Cetakan I. Jakarta : Reneka Cipta.
- Siahaan, N.H.T. 1987. *Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan*. Cetakan pertama. Jakarta : Erlangga.
- Silalahi, Daud. 1996. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta : Rajawali.
- , 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Rajawali Press.
- Soemitro, Ronny Hanityo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- , 1988. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- , 1991. *Majalah Masalah Hukum*, No.9, Semarang.
- Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah. 1980. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : CV Rajawali.
- Sundari Rangkuti, Siti. 1987. *Hukum Lingkungan Dan Kerjasama Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*. Disertasi Unair. Surabaya: Unair.
- Supardi, I. 1994. *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*. Cetakan I. Bandung: Alumni.
- Suparni, Niniek. 1994. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan HUKUM Lingkungan*, Cetakan II, Jakarta : Sinar Grafika.
- Statistik Industri Besar Dan Sedang Propinsi DIY*. 1996. Yogyakarta : BPS Kantor Statistik Prop. DIY.

Tim Panjapapda, 1997/1998. *Company Profile*, Kotamadia Dati II Yogyakarta.

Warassih, Esmi. 1994. *Keefektifan Hukum Dalam Menanggulangi Pencemaran Air*. Laporan Hasil Penelitian. Semarang : Universitas Diponegoro, Semarang.

-----, 1995. *Penegakan Hukum Dan Permasalahannya. Makalah*. Semarang : UMK.

Wasis, 1992. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Cetakan kelima, Bandung : Alumni.

Koran, Majalah :

Harian Bernas. 31 Agustus 1997. Yogyakarta.

Harian Kedauletatan Rakyat. 4 Oktober 1997. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1998.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.12/Men LH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
Peraturan Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 tahun 1977 tentang Ijin H.O.

Keputusan Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 037/KD/1988 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tempat Usaha.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Negara Republik Indonesia Nomor 256/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Tata Cara Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri Dan Tanda Daftar Industri.